



Sekretariat Kabinet  
Republik Indonesia

# LAPORAN KINERJA

## Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023



**BerAKHLAK**  **bangga  
melayani  
bangsa**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena di Tahun 2023 ini kita dapat kembali beraktifitas dengan normal setelah pandemi Covid-19 usai. Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dapat menjalankan tugas dan fungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan dengan lebih optimal.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi tersebut sekaligus pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 yang berisi pencapaian terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan tahun 2023 termasuk didalamnya membahas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, realisasi anggaran, analisis efisiensi penggunaan anggaran dan pengembangan sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana.

Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terus berkomitmen menjalankan manajemen organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dan sekaligus mendorong pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan Sekretariat Kabinet. Untuk itu, laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi akuntabilitas kinerja kepada semua pihak yang berkepentingan serta dapat menjadi masukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Jakarta, 08 Februari 2024

Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

Purnomo Sucipto

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet mempunyai tugas dan fungsi membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik dan perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan berpedoman kepada Dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024.

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 berisi tentang pencapaian terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2023, termasuk didalamnya membahas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, realisasi anggaran, analisis efisiensi penggunaan anggaran dan pengembangan sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana.

Rata-rata capaian keseluruhan sasaran kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang telah diperjanjikan adalah sebesar **103,99%** dan masuk dalam kategori “**Memuaskan**” dengan rincian sebagai berikut:

## Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator	Target	Jumlah Output	Realisasi	Capaian
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	96%	147 Rekomendasi	100%	104,16%
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	96%	92 Rekomendasi	100%	104,16%
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	96%	10 Rekomendasi	100%	104,16%
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan pogram pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	96%	23 Rekomendasi	100%	104,16%

## Sasaran Dukungan Manajemen

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	A (87,40)	A (87,60)	100.23%
	Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hasil reviu Inspektorat	33.97	33.97	100%
	Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	90%	99,97%	111.07%

Adapun dari sisi keuangan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada awal tahun 2023 mendapatkan anggaran sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah) yang digunakan untuk mencapai 3 sasaran yang telah diperjanjikan diatas. Namun, seiring dengan adanya kebijakan peralihan anggaran pada bulan September 2023, jumlah anggaran menjadi Rp2.310.616.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Sepanjang Tahun 2023 alokasi anggaran yang terserap setelah peralihan adalah sebesar **Rp2.309.906.616,00** (dua milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam ribu enam ratus enam belas rupiah) atau sebesar **99,97%**. Jika merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga terhadap perhitungan efisiensi level satuan kerja/Eselon I didapatkan kesimpulan bahwasanya penggunaan anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan termasuk kedalam kategori “**efisien**” dengan nilai efisiensi sebesar 0.03%.

Semua pencapaian diatas tidak terlepas dari upaya yang dilakukan di tahun 2023, diantaranya:

- meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya secara merata dan konsisten;
- menjalin hubungan baik dengan seluruh mitra kerja; dan
- memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

# Daftar Isi

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ..	1
1. Tugas dan Fungsi .....	1
2. Struktur Organisasi .....	2
3. Dukungan Sumber Daya Manusia .....	3
C. Aspek Strategis ( <i>Strategic Issues</i> ) .....	4
D. Permasalahan Utama .....	7
E. Langkah-langkah Strategis .....	8
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Gambaran Umum Perencanaan Kinerja Tahun 2023 .....	10
B. Ringkasan Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	10
C. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .....	16
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 .....	20
1. Capaian Sasaran 1 .....	21
2. Capaian Sasaran 2 .....	40
3. Capaian Sasaran 3 .....	55
4. Kegiatan Lain .....	59
B. Analisis Penggunaan Sumber Daya .....	65
1. Penggunaan Anggaran .....	65
2. Sumber Daya Manusia .....	68
3. Sarana dan Prasarana .....	69
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Kesimpulan .....	70
<b>LAMPIRAN</b> .....	71

# Daftar Tabel

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	16
Tabel 2.2	Pagu Anggaran pada Program Teknis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	17 18
Tabel 2.3	Pagu Anggaran pada Program Generik Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	18
Tabel 2.4	Rincian Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Unit Kerja Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 ...	18
Tabel 3.1	Realisasi Sasaran 1 Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	22
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Sasasan 1 Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	
Tabel 3.3	Realisasi Sasaran 2 Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	40
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasasan 2 Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	41
Tabel 3.5	Realisasi dan Capaian Kinerja Sasasan 3 Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	55
Tabel 3.6	Komponen Hasil Penilaian SAKIP Internal .....	58
Tabel 3.7	Pagu Anggaran Program Teknis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	66
Tabel 3.8	Pagu Anggaran Program Generik Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	66
Tabel 3.9	Perhitungan Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 .....	67

# Daftar Gambar

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....	3
Gambar 1.2	Komposisi SDM Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....	4
Gambar 2.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Polhukam .....	10
Gambar 2.2	Indikator Sasaran Pertama .....	11
Gambar 2.3	Indikator Sasaran Kedua .....	14
Gambar 2.4	Indikator Sasaran Ketiga .....	15
Gambar 3.1	Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja .....	20
Gambar 3.2	<i>Dashboard</i> Capaian Kinerja pada Aplikasi SIKT .....	21
Gambar 3.3	Perbandingan Capaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2021 s.d 2023 .....	23
Gambar 3.4	Surat Sekretaris Kabinet perihal Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Rencana Pemberian Bantuan Penanggulangan Bencana <i>Cyclone Judy</i> dan Kevin kepada Vanuatu .....	25
Gambar 3.5	Surat Sekretaris Kabinet dan Bahan Risalah Rapat Internal tentang Pemenuhan Anggaran Pembangunan Sistem Pertahanan .....	27
Gambar 3.6	Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Permohonan Izin Pembukaan Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan .....	28
Gambar 3.7	Surat Sekretaris Kabinet dan Bahan Substansi bagi Presiden untuk Membuka dan Memberikan Arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia .....	29
Gambar 3.8	Surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait Saran Masukan Pemanfaatan Kerja Sama antara Pemerintah RI dengan Organisasi Internasional di Indonesia .....	30
Gambar 3.9	Suasana Rapat Pleno Setnas ASEAN Indonesia .....	31
Gambar 3.10	Keikutsertaan Perwakilan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Rapat Pleno Setnas ASEAN Indonesia .....	32

# Daftar Gambar

Gambar 3.11 Keputusan Sekretariat Nasional ASEAN Nomor 005/KEP/SETNASASEAN/10/2023 .....	33
Gambar 3.12 Piagam Penghargaan Mitra Strategis dalam Pembentukan Perundang-undangan Tahun 2023 .....	33
Gambar 3.13 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman .....	35
Gambar 3.14 Surat Seskab perihal Persetujuan Presiden atas RPermenlu tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan RI di Luar Negeri .....	36
Gambar 3.15 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 .....	38
Gambar 3.16 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan BNPP tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara .....	39
Gambar 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2021 s.d 2023 .....	41
Gambar 3.18 Surat Sekretaris Kabinet perihal penyelesaian Masalah di Bidang Politik, Ekonomi, maupun Sosial Budaya .....	45
Gambar 3.19 Surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Penyampaian Saran Masukan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri .....	46
Gambar 3.20 Kolase Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat .....	47
Gambar 3.21 Kegiatan Peninjauan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah .....	49

# Daftar Gambar

Gambar 3.22	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik ....	50
Gambar 3.23	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah .....	52
Gambar 3.24	Diskusi bersama Kementerian Dalam Negeri tanggal 13 Desember 2023 di Jakarta .....	53
Gambar 3.25	Capaian Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....	56
Gambar 3.26	Capaian Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....	58
Gambar 3.27	Capaian Penyerapan Anggaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....	58
Gambar 3.28	Perbandingan Capaian Penyerapan Anggaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan .....	59
Gambar 3.29	Diskusi Kelompok Terpumpun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah .....	60
Gambar 3.30	Diskusi Kelompok Terpumpun di Provinsi Bengkulu .....	60
Gambar 3.31	Peninjauan Rencana Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia .....	61
Gambar 3.32	Pemantauan Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis BKN Bengkulu .....	61
Gambar 3.33	Pemantauan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Kuningan .....	62
Gambar 3.34	Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Hasil Kajian Dewan Ketahanan Nasional dan Penyikapan Isu-isu Strategis Nasional .....	62
Gambar 3.35	Wakil Sekretaris Kabinet Bersama Jajaran Pejabat Sekretariat Kabinet Menerima Wakil Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea .....	63
Gambar 3.36	Kunjungan INPUMA Universiti Malaya, Malaysia .....	64
Gambar 3.37	Pemantauan Kegiatan Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 .....	64

# Daftar Gambar

Gambar 3.38 Rumus Perhitungan Efisiensi Satuan Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 .....	67
Gambar 3.39 Perbandingan SDM Kedeputian Bidang Polhukam Tahun 2022 dan 2023 .....	68
Gambar 3.40 Sarana dan Prasarana di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam .....	69
Gambar 3.41 Tata Ruang Kantor di lingkungan Kedeputian Bidang Polhukam .....	69

# BAB I

# PENDAHULUAN



# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka membangun birokrasi yang profesional dan bersih melayani, pemerintah harus berpijak pada *Good Governance* yang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang penting seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap. Nilai-nilai lainnya seperti transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik juga merupakan nilai-nilai esensial yang berpengaruh pada kinerja yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Sejalan dengan maksud tersebut, maka Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Sekretariat Kabinet (Deputy Bidang Polhukam) sebagai bagian dari Pemerintah Pusat telah menyusun Laporan Kinerja (LKj). Penyusunan tersebut didasarkan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam laporan ini menjelaskan hasil kinerja organisasi selama kurun waktu tahun 2023 sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban pencapaian tujuan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden tersebut.

## **B. GAMBARAN UMUM DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Deputy Bidang Polhukam dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet yang dijabarkan lebih rinci terkait tugas dan fungsi serta struktur organisasi eselon II (unit kerja pendukung) melalui Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Deputy Bidang Polhukam adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kabinet.

### **1. Tugas, dan Fungsi**

Deputy Bidang Polhukam mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.



Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Polhukam menyelenggarakan fungsi:

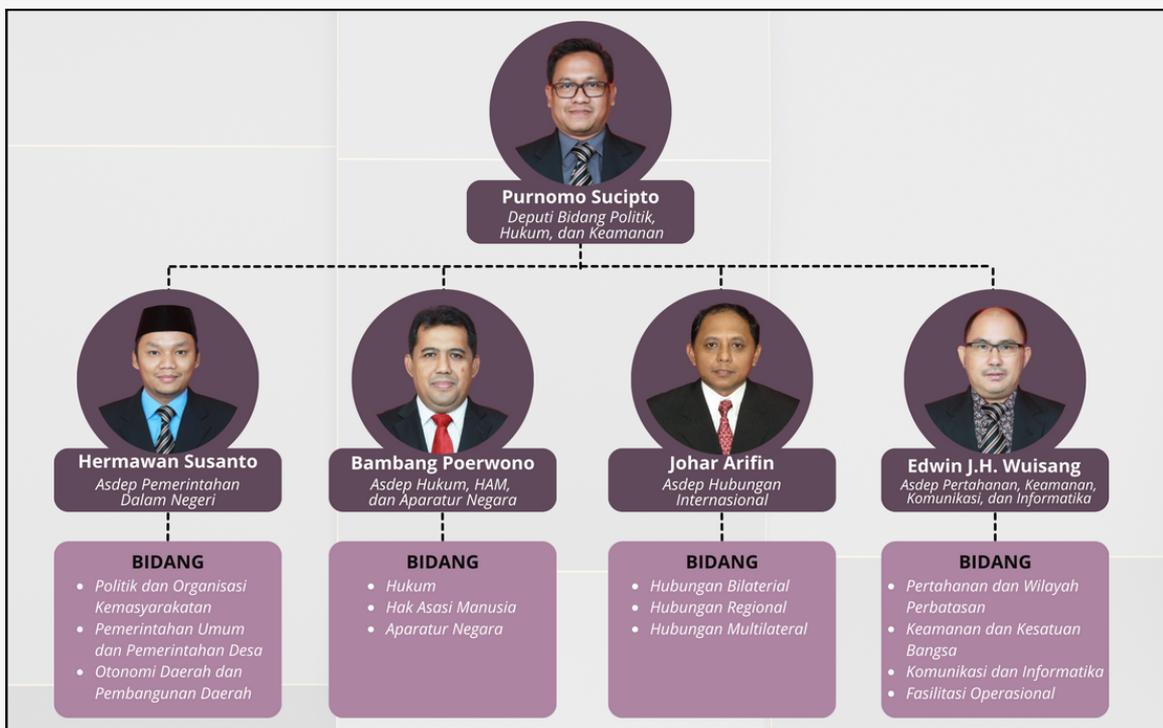
- a. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- d. pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
- e. penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang politik, hukum, dan keamanan;
- f. penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabinet.

## **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pemberian dukungan manajemen kabinet, khususnya terkait dengan pemberian rekomendasi kebijakan, pelaksanaannya dibagi dalam pembidangan melalui pendekatan sektoral, *mirroring* dengan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan yaitu dalam lingkup bidang politik, hukum, dan keamanan. Pembagian bidang tersebut bertujuan agar pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola manajemen kabinet berlangsung efektif. Struktur organisasi Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terdiri dari:

1. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri
  - a. Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. Bidang Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Desa; dan
  - c. Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah.
2. Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara
  - a. Bidang Hukum;

- b. Bidang Hak Asasi Manusia; dan
- c. Bidang Aparatur Negara.
3. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
  - a. Bidang Hubungan Bilateral;
  - b. Bidang Hubungan Regional; dan
  - c. Bidang Hubungan Multilateral.
4. Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi dan Informatika
  - a. Bidang Pertahanan dan Wilayah Perbatasan;
  - b. Bidang Keamanan dan Kesatuan Bangsa;
  - c. Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
  - d. Bidang Fasilitas Operasional.



**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kedeputian Bidang Politik, hukum, dan Keamanan**

### 3. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan dukungan manajemen kabinet, sampai dengan bulan Desember 2023 Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 70 (tujuh puluh) orang yang terdiri dari 47 orang pejabat struktural (eselon I, II, III, dan IV), 23 orang analis (yakni analis bidang hukum, analis bidang polhukam, analis kinerja, analis data dan informasi, dan penyusun rencana kegiatan dan anggaran).

Selain itu Deputi Bidang Polhukam juga dibantu pegawai tidak tetap (PTT) yang terdiri dari 5 orang pramubakti, 1 orang pramusaji, 2 orang pengemudi, dan 1 orang tenaga kebersihan.

Adapun komposisi pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam berdasarkan pangkat/golongan, jabatan, pendidikan, dan jenis kelamin per tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagaimana berikut:



**Gambar 1.2 Komposisi SDM Kedeputian Bidang Politik, hukum, dan Keamanan**

### C. ASPEK STRATEGIS

Aspek strategis merupakan hal-hal yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dengan tugasnya memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Deputi Bidang Polhukam dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas tersebut, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan yang berkualitas dan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan. Melalui tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Polhukam merupakan unit organisasi yang berada dalam posisi netral yang dituntut untuk dapat memberikan analisis, pandangan atau pemikiran di bidang politik, hukum, dan keamanan secara profesional dan berkualitas tanpa ada intervensi dari manapun.

Lebih lanjut, terkait penyelenggaraan tugas pengelolaan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan, Deputi Bidang Polhukam berperan



memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para *stakeholder*, terutama kebijakan dan program di bidang politik, hukum, dan keamanan yang diarahkan dan menjadi prioritas perhatian Presiden.

Dalam menjalankan fungsi manajemen kabinet, Deputi Bidang Polhukam terlibat aktif dalam membantu Sekretaris Kabinet dalam proses manajemen kabinet, mulai dari proses formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Deputi Bidang Polhukam juga bertugas menangani isu-isu strategis terkait perumusan dan permasalahan program dan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri, hukum, hak asasi manusia, aparatur negara, hubungan internasional, pertahanan, keamanan, komunikasi, dan informatika.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyiapkan bahan yang akan dibahas dalam sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, menyiapkan alternatif kebijakan yang akan diambil Presiden, selain itu juga memastikan bahwa arahan Presiden yang disampaikan dalam sidang kabinet maupun rapat terbatas serta pertemuan yang dihadiri Presiden telah dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/instansi terkait.

Selain hal tersebut di atas, Sekretariat Kabinet melaksanakan tugas dan fungsi yang cukup strategis dalam mendukung pelaksanaan manajemen kabinet yakni memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang mendapatkan persetujuan Presiden dan penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan. Dua fungsi tersebut sangat strategis sehingga dalam pelaksanaannya perlu didukung oleh sumber daya manusia yang andal dan kompeten serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang andal dan terintegrasi.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Deputi Bidang Polhukam memiliki beberapa aspek strategis yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam diantaranya adalah:

### **1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan SDM (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dengan mengajak berdiskusi, *brainstorming*, cara berpikir/menganalisis yang benar, memberikan arahan atas substansi permasalahan yang perlu mendapat



perhatian, dan mengikutsertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop* yang ditawarkan. Pemberdayaan SDM ini dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri pejabat/pegawai di lingkungan Deputi Bidang Polhukam dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Sumber Daya Manusia di Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari sisi latar belakang pendidikan sudah cukup baik karena sekitar 49% merupakan lulusan S3 dan S2 baik dari dalam dan luar negeri. Namun, dari sisi kuantitas belum ideal karena saat ini masih terdapat Kepala Subbidang hanya didukung oleh 1 (satu) orang analis dimana secara formasi seharusnya didukung oleh 2 (dua) orang analis. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut pimpinan di Deputi Bidang Polhukam terus mendorong pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 dan S2 serta mengambil kegiatan *self development* yang terbuka dan berguna bagi peningkatan kemampuan menganalisis, selain diklat-diklat yang ditawarkan oleh Sekretariat Kabinet.

## **2. Aspek Keuangan/Anggaran**

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi kebutuhan anggaran Deputi Bidang Polhukam guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan kajian, analisis, dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Penggunaan anggaran dibuat seefisien dan seefektif mungkin, dengan anggaran yang ada diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang menjadi perhatian/prioritas Presiden yakni monitoring dan evaluasi tindak lanjut arahan Presiden dan keikutsertaan dalam pembahasan dan penyusunan kebijakan di K/L terkait. Di tahun 2023 Deputi Bidang Polhukam mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah), seiring dengan kebijakan penghematan anggaran, Deputi Bidang Polhukam mendapatkan anggaran sebesar Rp2.310.616.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yang digunakan untuk mendukung kegiatan-kegiatan prioritas yang sudah direncanakan.

### 3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP) khususnya untuk mendukung tugas dan fungsi utama Sekretariat Kabinet, dengan secara berkala melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi Bidang Polhukam serta memberi masukan untuk membangun aplikasi berbasis teknologi informasi.

Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai tugas dan fungsi akan dipengaruhi oleh ekspektasi para pemangku kepentingan. Peningkatan kualitas layanan prima dalam penyusunan rekomendasi yang berkualitas (cepat, akurat, dan tepat) serta aman (*zero mistake*) tetap harus menjadi tujuan utama organisasi.

#### D. PERMASALAHAN UTAMA

Meskipun memiliki posisi dan aspek strategis, Deputi Bidang Polhukam masih memiliki permasalahan yang berimplikasi belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Deputi Bidang Polhukam untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama Deputi Bidang Polhukam terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah:

##### 1. Belum terpenuhinya kompetensi dan jumlah analis yang diharapkan

Meningkatnya peran Deputi Bidang Polhukam dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet harus didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi andal. Namun, kondisi yang ada kompetensi SDM belum merata pada masing-masing subbidang. Sebagai gambaran SDM yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang Polhukam saat ini adalah SDM yang memiliki kemampuan pemahaman terkait ilmu hukum dan ilmu kebijakan publik (*public policy*) termasuk kemampuan untuk menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analyst*).

Dari sisi kuantitas SDM yang ada saat ini belum sesuai dengan kondisi idealnya dimana setiap Kepala Subbidang perlu didukung oleh 2 (dua) orang analis yakni Analis Hukum dan Analis Polhukam guna mendukung dalam penyiapan rekomendasi yang berkualitas.

## **2. Masih lemahnya *networking*, sinergi, koordinasi, dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait**

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan harus menjalin *networking* dan koordinasi yang lebih intens dan bersinergi serta berkolaborasi dengan seluruh *stakeholder*. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan masukan, pandangan, pendapat, harapan yang tepat dalam mendukung tercapainya tujuan organisasi.

## **3. Belum optimalnya dukungan sistem informasi**

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Setkab dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Deputi Bidang Polhukam juga dituntut untuk dapat memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang menuju budaya kerja yang berorientasi pada profesional, andal, dan berwibawa. Untuk itu, perlu didukung oleh keberadaan sistem informasi yang terintegrasi sehingga dapat menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi terkait penyiapan rekomendasi yang berkualitas.

## **E. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS**

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (*strategic issued*) tersebut di atas, selanjutnya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya meningkatkan kinerja Deputi Bidang Polhukam diantaranya meliputi:

### **1. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai**

Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam yang dapat diatasi diantaranya melalui diskusi-diskusi, penugasan khusus, dan menjelaskan substansi permasalahan yang sedang ditangani secara simultan di waktu-waktu tertentu, mengikutsertakan pejabat/ pegawai dalam setiap rapat-rapat koordinasi, mengikuti pendidikan dan pelatihan serta *self development*, *workshop*, seminar, dan diskusi terpumpun baik yang diselenggarakan internal Kedeputusan Bidang Polhukam, maupun unit kerja lain di Sekretariat Kabinet atau instansi terkait, menyusun buku referensi sesuai bidang yang dikuasai, dan mendorong untuk menyusun artikel yang ditayangkan dalam *website* setkab.go.id terkait dengan materi atau isu yang berkembang sesuai dengan bidang yang dikuasainya.

### **2. Peningkatan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi**

Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang berkualitas tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif instansi pemerintah, pemangku kepentingan, dan partisipasi publik



seluas-luasnya, dengan tetap mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Terkait hal tersebut, Deputi Bidang Polhukam telah melakukan kunjungan secara berkala ke mitra kerja, dan mengundang pejabat instansi terkait guna membangun sinergi dan kolaborasi serta koordinasi guna mendukung kemudahan dalam penyusunan rekomendasi yang berkualitas.

### **3. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi**

Memberi masukan dan mendorong agar Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Kabinet dapat terus melakukan perbaikan sistem informasi dan *database* yang sudah ada guna mendukung pencapaian kinerja Deputi Bidang Polhukam pada khususnya dan Sekretariat Kabinet pada umumnya melalui penyelenggaraan *e-government*

Selain itu juga, Deputi Bidang Polhukam perlu menjalin koordinasi dan komunikasi intensif dengan instansi terkait dalam pemanfaatan sistem informasi yang mereka miliki agar dapat dimanfaatkan secara mudah dan cepat oleh Sekretariat Kabinet.

# BAB II

# PERENCANAAN KINERJA



# BAB II. PERENCANAAN KINERJA

## A. GAMBARAN UMUM PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2023

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Deputi Bidang Polhukam) Sekretariat Kabinet dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik telah menyusun perencanaan kinerja tahun 2023 dengan berpedoman pada dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet yang ditetapkan dengan Perseskab Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Setkab Tahun 2020 - 2024.

Sebagaimana tercantum dalam perubahan rencana strategis Sekretariat Kabinet tersebut, bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran Deputi Bidang Polhukam yang dapat mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet adalah:



**Gambar 2.1** Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Deputi Bidang Polhukam

Ukuran keberhasilan Deputi Bidang Polhukam dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut diatas dapat dilihat dari ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penjelasannya telah tertuang dalam dokumen IKU.

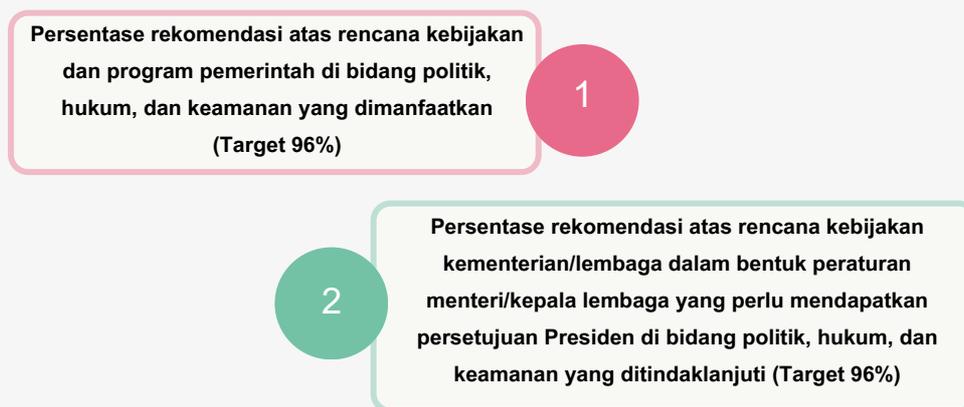
## B. RINGKASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan saran dan masukan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Sekretariat Kabinet Tahun 2021, Sekretariat Kabinet melakukan perubahan IKU yang disahkan melalui Perseskab Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 2 Januari 2023.

Hal tersebut sekaligus berdampak pada perubahan IKU di Kedeputan Bidang Polhukam menjadi sebagai berikut:

### **Sasaran 1: Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan**

Sasaran pertama dicapai melalui fungsi pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden, serta penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum. Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis rekomendasi kebijakan, yaitu rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah dan rekomendasi atas rencana kebijakan/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan presiden. Sasaran ini diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yaitu:



**Gambar 2.2 Indikator Sasaran Pertama**

Indikator pertama mengukur keberhasilan kinerja sasaran melalui *output* rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah. Rekomendasi yang disiapkan oleh Deputi Bidang Polhukam bagi Sekretaris Kabinet yang disampaikan kepada pemangku kepentingan yakni Presiden dan Menteri atau Kepala Lembaga dapat berupa:

- rekomendasi berdasarkan berkas yang masuk, baik yang berasal dari instansi pemerintah maupun dari pengaduan masyarakat;
- rekomendasi berdasarkan permintaan langsung dan segera dari Presiden;
- rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;

- 
- d. rekomendasi berdasarkan tugas khusus yang diberikan oleh Presiden;
  - e. rekomendasi atas masalah yang muncul secara spontan;
  - f. rekomendasi berdasarkan kajian akademik; dan
  - g. rekomendasi dalam rangka penyiapan materi sidang kabinet.

Rumusan indikator rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah pada sasaran pertama memperlihatkan bahwa rekomendasi kebijakan pemerintah yang berkualitas adalah rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan bahwa suatu rekomendasi telah dimanfaatkan yaitu:

- a. rekomendasi tersebut digunakan oleh Presiden, Menteri, dan/atau Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan pemerintah. Penggunaan rekomendasi dibuktikan dengan adanya pernyataan, arahan, disposisi, atau dikeluarkannya suatu kebijakan yang isinya menggambarkan rekomendasi yang dibuat Sekretariat Kabinet;
- b. rekomendasi diterima Presiden tanpa ada disposisi yang menyatakan bahwa Presiden menolak atau menyatakan tidak akan menggunakan rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan *tracing* nomor tanda terima serta disposisi atas memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden;
- c. rekomendasi digunakan oleh Menteri/Kepala Lembaga sebagai bahan kebijakan dan/atau program pemerintah dapat diindikasikan dengan bukti seperti dokumen undangan rapat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau memorandum notulen hasil rapat yang menggambarkan gagasan dan saran pendapat Sekretariat Kabinet dalam rangka penyusunan bahan rekomendasi kebijakan;
- d. rekomendasi diterima Menteri/Kepala Lembaga tanpa ada pernyataan penolakan atau ketidaksetujuan atas rekomendasi yang diberikan Sekretariat Kabinet, dibuktikan dengan melakukan pemantauan atas surat keluar Sekretariat Kabinet; dan/atau
- e. rekomendasi yang tertuang dalam materi atau bahan sidang kabinet, pemanfaatannya dapat dilihat salah satunya dari hasil sidang (risalah).

Rumus penghitungan pencapaian indikator pertama sasaran pertama adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Indikator kedua mengukur kinerja Deputi Bidang Polhukam dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang politik, hukum, dan keamanan yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan rekomendasi telah ditindaklanjuti yaitu:

- a. rekomendasi yang disampaikan Sekretariat Kabinet berupa ditetapkannya atau dibatalkannya rencana kebijakan dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga disetujui oleh Presiden; dan/atau
- b. rekomendasi hasil analisis atas substansi peraturan menteri/kepala lembaga berupa usulan perubahan ditindaklanjuti Menteri/Kepala Lembaga.

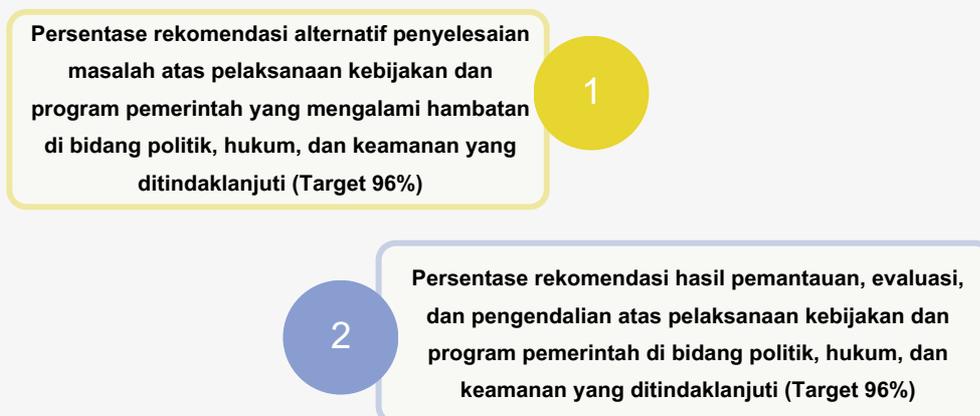
Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua sasaran pertama adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

## Sasaran 2: Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Ruang lingkup sasaran strategis kedua adalah penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kegiatan pengendalian menghasilkan 2 (dua) jenis *output*, yaitu alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan dan hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.

Sasaran strategis kedua diukur pencapaiannya dengan 2 (dua) buah indikator yaitu:



**Gambar 2.3 Indikator Sasaran Kedua**

Indikator pertama mengukur kinerja Deputi Bidang Polhukam dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang mengalami hambatan. Kriteria digunakan untuk menetapkan rekomendasi telah ditindaklanjuti yaitu:

- a. alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan Sekretariat Kabinet digunakan sebagai dasar bertindak Presiden, Menteri dan/atau Kepala Lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi; dan
- b. rencana aksi penyelesaian masalah dilaksanakan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua sasaran pertama adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah oleh Sekretariat Kabinet atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

Indikator kedua digunakan untuk mengukur kinerja Deputi Bidang Polhukam dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan. Kriteria yang digunakan untuk menetapkan telah ditindaklanjuti yaitu rekomendasi di dalam laporan hasil

pemantauan, evaluasi, dan pengendalian digunakan sebagai masukan (*feedback*) atau dasar pemberian sanksi oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga dalam rangka mengevaluasi atau mengoreksi pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang perlu diperbaiki.

Rumus penghitungan pencapaian indikator kedua sasaran pertama adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang ditindaklanjuti oleh Presiden/Menteri/Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/ Kepala Lembaga}} \times 100\%$$

### C. RINGKASAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja beserta target kinerja dan anggaran. Pada tahun 2023, Deputi Bidang Polhukam telah menetapkan perjanjian kinerja yang memuat seluruh sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Deputi Bidang Polhukam dengan penambahan sasaran “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” sebagai pendukung untuk tercapainya sasaran dukungan manajemen yang ada dalam perjanjian kinerja Sekretaris Kabinet yaitu terkait Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adapun sasaran tersebut diukur menggunakan 3 (tiga) buah indikator yaitu:

- 1 Hasil Penilaian SAKIP Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Target A (87.40))
- 2 Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hasil reuiu Inspektorat (Target 33.97)
- 3 Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Target 90 %)

Gambar 2.4 Indikator Sasaran Ketiga

Secara keseluruhan, sasaran, indikator dan target yang diperjanjikan oleh Deputi Bidang Polhukam adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	96 Persen
	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	96 Persen
Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	96 Persen
	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	96 Persen
Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Hasil Penilaian SAKIP Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	A (87,40)
	Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hasil revidu Inspektorat	33,97
	Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	90 Persen

Pencapaian sasaran kinerja organisasi perlu didukung arah kebijakan dan strategi yang memuat langkah-langkah berupa program-program indikatif, kegiatan beserta anggarannya.

Adapun program Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk mencapai Sasaran strategis dibagi menjadi dua yakni Program Teknis dan Program Generik.

### **Program Teknis: Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden**

Program teknis ditetapkan untuk mendukung terwujudnya pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis Deputi Bidang Polhukam. Pada tahun 2023 anggaran terkait penyelenggaraan layanan kepada Presiden dan Wakil Presiden Deputi Bidang Polhukam adalah sebesar Rp4.400.000.000,00 (empat milyar empat ratus juta rupiah), namun seiring dengan adanya kebijakan peralihan anggaran berubah menjadi Rp2.294.418.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah). Adapun anggaran tersebut digunakan untuk mencapai dua kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Pagu Anggaran pada Program Teknis Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

KEGIATAN	PAGU AWAL	PAGU REVISI
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp2.727.089.000	Rp1.467.792.000
Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp1.672.911.000	Rp826.626.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp4.400.000.000</b>	<b>Rp2.294.418.000</b>

### **Program Generik: Dukungan Manajemen**

Program generik dukungan manajemen merupakan motor penggerak kinerja Kedeputian Bidang Polhukam seperti pengelolaan perencanaan dan keuangan, pengelolaan kinerja organisasi, reformasi birokrasi, dan penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional serta layanan tata usaha. Pada tahun 2023 anggaran terkait dukungan manajemen sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), namun seiring dengan adanya kebijakan peralihan anggaran berubah menjadi Rp16.198.000,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Adapun anggaran tersebut digunakan untuk mencapai kegiatan:

**Tabel 2.3 Pagu Anggaran pada Program Generik  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

<b>KEGIATAN</b>	<b>PAGU AWAL</b>	<b>PAGU REVISI</b>
Penyelenggaraan Layanan Fasilitas Operasional dan Layanan Tata Usaha	Rp200.000.000	Rp16.198.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp200.000.000</b>	<b>Rp16.198.000</b>

Dari target anggaran dan kegiatan yang telah dioptimalisasi dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja di Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.4 Rincian Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Unit Kerja  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>
<b>Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri</b>	<b>Rp483.679.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan</li> <li>• Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan</li> </ul>	Rp181.911.000 Rp301.768.000
<b>Asisten Deputi Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara</b>	<b>Rp455.711.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan</li> <li>• Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan</li> </ul>	Rp278.638.000 Rp177.073.000
<b>Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional</b>	<b>Rp552.102.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan</li> <li>• Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan</li> </ul>	Rp442.273.000 Rp109.829.000

URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Asisten Deputi Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika</b>	<b>Rp819.124.000</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan</li> </ul>	Rp564.970.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan</li> </ul>	Rp237.956.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha</li> </ul>	Rp16.198.000

# BAB III

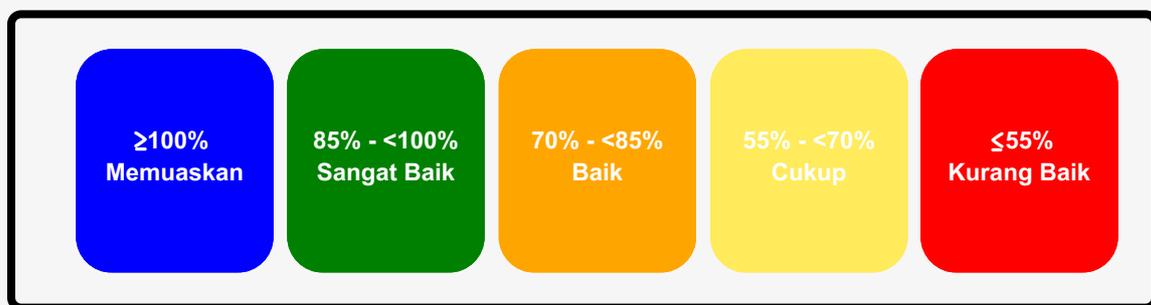
# AKUNTABILITAS KINERJA



# BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi capaian kinerja terhadap sasaran dan indikator yang telah di perjanjikan sebelumnya, termasuk didalamnya membahas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, realisasi anggaran, analisis efisiensi penggunaan anggaran dan pengembangan sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana.

Dalam menentukan interpretasi interval capaian kinerja, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggunakan 5 (lima) indikator warna yaitu:

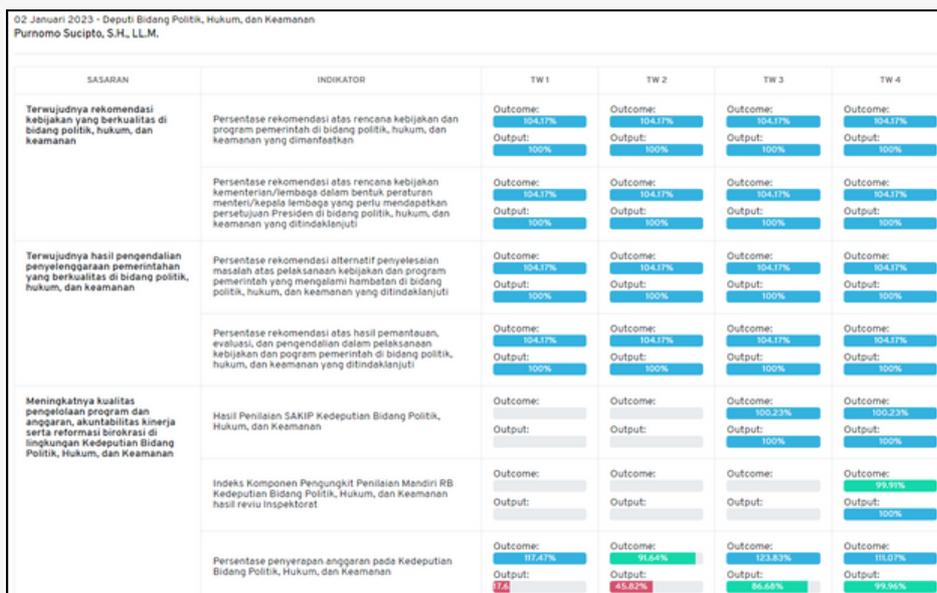


Gambar 3.1 Indikator Warna Kategori Capaian Kinerja

## A. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020–2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memiliki 3 (tiga) buah Sasaran Kinerja dengan 7 (tujuh) indikator untuk mengukur capaian kinerjanya.

Dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya guna mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Capaian tersebut secara umum dapat terlihat pada tangkapan layar *dashboard* Aplikasi SIKT (<https://sikt2.intranet>) yang merupakan aplikasi monitoring kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet seperti di bawah ini:



**Gambar 3.2 Dashboard Capaian Kinerja pada Aplikasi SIKT**

Pada *dashboard* capaian kinerja diatas didapatkan bahwasanya capaian kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 adalah **103,99%** dan masuk dalam kategori **“Memuaskan”** karena total rata-rata keseluruhan indikator lebih dari 100. Adapun secara lebih rinci data tersebut dijabarkan dalam penjelasan berikut:

## Sasaran 1

Sasaran 1 “Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan” diukur dengan menggunakan 2 (dua) indikator yaitu “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan” dan “Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti”. Berdasarkan capaian pada laporan rencana kinerja bulanan dan aplikasi SIKT tahun 2023, Deputy Politik, Hukum, dan Keamanan telah menghasilkan 147 rekomendasi untuk indikator 1 dan 92 rekomendasi untuk indikator 2. Adapun rekomendasi tersebut dalam bentuk memorandum yang disampaikan kepada Presiden dan/atau surat yang disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga. Dari total 239 rekomendasi yang dihasilkan telah seluruhnya dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Jika dihitung berdasarkan formulasi rumus pada masing-masing indikator yang telah dijabarkan pada Bab II didapatkan realisasi capaian kinerja sebagai berikut:

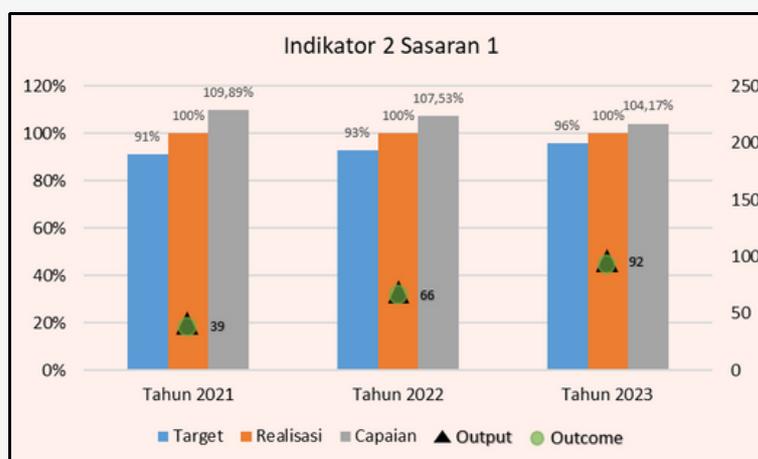
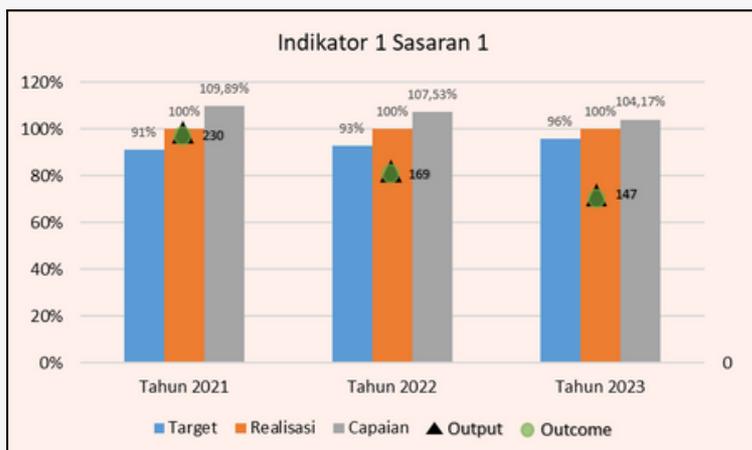
**Tabel 3.1 Realisasi Sasaran 1  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>REALISASI</b>
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	147	147	100%
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	92	92	100%
<b>TOTAL</b>	<b>239</b>	<b>239</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan realisasi yang dihasilkan setiap indikator pada sasaran 1 jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada tahun 2023 yaitu 96% didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

<b>INDIKATOR</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>	<b>CAPAIAN</b>
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang dimanfaatkan	96%	100%	104.17%
Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti	96%	100%	104.17%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>104.17%</b>



**Gambar 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran 1 Tahun 2021 s.d 2023**

Jika dibandingkan dengan besaran persentase capaian kinerja pada tahun sebelumnya, capaian Indikator pada sasaran 1 tahun 2023 tergambar menurun dari tahun sebelumnya meskipun realisasi yang dilakukan mencapai 100%, hal ini disebabkan oleh kenaikan target sebesar 3% dari tahun 2022 yaitu dari 93% menjadi 96%, sehingga mempengaruhi rumus perhitungan pembagi capaian kinerja. Adapun secara kualitas rekomendasi yang dihasilkan tidak mengalami penurunan karena baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023 semua rekomendasi telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh *stakeholder*.

Sebagai gambaran pencapaian indikator kinerja pada sasaran 1, berikut ini beberapa rekomendasi yang dihasilkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti *stakeholder*.



**Rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.**

**1**

### **Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Rencana Pemberian Bantuan Penanggulangan Bencana *Cyclone* Judy dan Kevin kepada Vanuatu**

Terhadap situasi tersebut, Sekretariat Kabinet melalui Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan saran pertimbangan kepada Presiden sebagai berikut:

Pemerintah Vanuatu menyampaikan permohonan bantuan penanggulangan bencana *Cyclone* Judy dan Kevin yang melanda Vanuatu pada awal Maret 2023 lalu. Pemerintah Vanuatu juga menyatakan keadaan darurat bencana selama 6 bulan. Pemerintah Vanuatu secara spesifik mengharapkan adanya bantuan dalam bentuk pendanaan, namun tidak menutup kemungkinan bantuan juga diberikan secara *in kind* berupa barang-barang produksi Indonesia.

- a. Pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia pernah memberikan bantuan penanggulangan bencana senilai USD 2 juta, dalam bentuk *in kind* berupa bantuan logistik dan tim terpadu sebanyak 19 orang untuk memenuhi kebutuhan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana topan Pam di Vanuatu.
- b. Pemberian bantuan untuk penanggulangan bencana di Vanuatu merupakan upaya Indonesia meningkatkan *engagement* di kawasan Pasifik, yang akan berkontribusi terhadap kedaulatan dan integritas wilayah NKRI. Sebagai catatan, selama ini Vanuatu aktif menyuarakan isu Papua di forum internasional seperti Sidang Majelis Umum PBB. Namun demikian, pada Sidang Majelis Umum PBB bulan September 2022, Vanuatu tidak lagi mengangkat isu Papua tersebut.
- c. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada Pemerintah Asing/Lembaga Asing, Pemerintah Indonesia masih dapat memberikan bantuan hibah di luar Daftar Rencana Pemberian Hibah (DRPH) yang telah ditetapkan untuk tujuan kemanusiaan dan dapat dilaksanakan tanpa berpedoman kepada kebijakan pemberian hibah. Sesuai dengan kedua Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Luar Negeri mengusulkan pemberian hibah di luar DRPH kepada Komite Pengarah Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional untuk mendapatkan persetujuan. Namun, mempertimbangkan pelaksanaan pengiriman

bantuan kepada Vanuatu akan dilakukan lintas K/L, maka diperlukan persetujuan Presiden RI untuk pemberian bantuan dimaksud.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan berpandangan kiranya permohonan bantuan penanggulangan bencana *Cyclone Judy* dan *Kevin* oleh Pemerintah Vanuatu dapat dipertimbangan secara positif untuk dipenuhi, sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Selanjutnya, Sekretaris Kabinet menyampaikan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Luar Negeri melalui surat Nomor: R.0049/Seskab/Polhukam/04/2023 tanggal 6 April 2023.



**Gambar 3.4 Surat Sekretaris Kabinet perihal Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Rencana Pemberian Bantuan Penanggulangan Bencana *Cyclone Judy* dan *Kevin* kepada Vanuatu**

## **2** Penyampaian Bahan Rapat Internal Perihal Pemenuhan Anggaran Pembangunan Sistem Pertahanan.

Pada Rapat Internal 29 Desember 2021, Menteri Pertahanan melapor kepada Presiden bahwa kondisi Alutsista dan kesiapan tempur TNI berada di titik terendah, dengan capaian pembangunan kekuatan pokok TNI tahap I (2010-2014) 54,9%, tahap II (2015-2019) 63,1%, dan tahap III (2020-2024) sejauh ini 62,3%. Kondisi ini menyulitkan TNI dalam menghadapi ancaman dari dalam dan luar negeri, di tengah dinamika geopolitik yang semakin tidak dapat diprediksi. Merespon laporan Menteri Pertahanan, Presiden telah memberikan arahan:

- 
- a. Target utama pembangunan pertahanan adalah membentuk pertahanan yang tangguh dan disegani. Karena itu, segera siapkan rencana strategis jangka panjang (disepakati dalam bentuk RPerpres tentang Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Pembangunan Sistem Pertahanan Negara/RPerpres Sishanneg);
  - b. Substansi RPerpres Sishanneg diarahkan untuk menyelesaikan tahap III pembangunan kekuatan pokok TNI;
  - c. Sumber pendanaan agar tidak sepenuhnya bergantung pada APBN, cari peluang untuk mengubah belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan;
  - d. Perhatikan paparan Kementerian Keuangan terkait penetapan *bluebook* pembangunan sistem pertahanan negara yang nilainya mencapai USD 55,27 M hingga tahun 2034, dengan rincian *bluebook* 2020-2024 sebesar USD 20,75 M, *bluebook* 2025-2030 sebesar USD 17,3 M, dan *bluebook* 2030-2034 sebesar USD 17,3 M. Siapkan perencanaan ketiga *bluebook* tersebut, termasuk pembiayaan per lima tahun.

Kementerian Pertahanan ingin ketentuan RPerpres memungkinkan seluruh kontrak pengadaan Alutsista sepanjang 2020-2044 dalam kerangka Sishanneg dapat direalisasikan seluruhnya pada tahun 2020-2024, sementara Kementerian Keuangan tidak menerima usulan dimaksud karena tidak sesuai kaidah akuntansi dan sistem keuangan negara. Terhadap permasalahan dimaksud, Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memberikan saran arahan Presiden sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan anggaran untuk pembangunan sistem pertahanan melalui RPerpres Sishanneg senilai USD 55,27 M agar diadakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan ruang fiskal tiap tahun (APBN);
- b. Terkait *pending matters* yaitu usulan Menteri Pertahanan agar seluruh kontrak pengadaan Alutsista sepanjang 2020-2044 dalam kerangka Sishanneg dapat direalisasikan di depan pada tahun 2020-2024, Menteri Keuangan perlu menegaskan apakah usulan tersebut dapat diterima atau ditolak;
- c. Kementerian Pertahanan agar memastikan bahwa RPerpres Sishanneg ditujukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan Alutsista dalam rangka pembangunan kekuatan pokok TNI.



**Gambar 3.5 Surat Sekretaris Kabinet dan Bahan Risalah Rapat Internal tentang Pemenuhan Anggaran Pembangunan Sistem Pertahanan**

**3**

**Persetujuan Presiden atas Permohonan Izin Pembukaan Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan**

Ketua Mahkamah Agung menyampaikan kepada Presiden permohonan izin pembangunan 17 (tujuh belas) gedung kantor pengadilan. Terdapat 5 (lima) pengadilan yang diusulkan dan telah melengkapi dokumen yang disyaratkan yaitu asetnya telah masuk dalam RKBMN, analisis pembiayaan Kementerian PUPR, desain gedung, dan foto kondisi kantor serta lahan. Permohonan tersebut diajukan karena kondisi fasilitas gedung kantor pengadilan yang ada sudah tidak dapat mendukung pelayanan publik secara memadai. Selain itu, letak dan akses menuju kantor pengadilan dimaksud terbatas, sehingga akses masyarakat juga terbatas.

Sekretariat Kabinet mencatat bahwa Ketua Mahkamah Agung telah 3 (tiga) kali menyampaikan permohonan pembangunan gedung kantor Pengadilan Militer III-19 Jayapura (Dilmil Jayapura). Sekretariat Kabinet juga berpendapat bahwa pengadilan merupakan entitas di lingkungan Mahkamah Agung yang melaksanakan pelayanan publik terkait dengan akses bagi pencari keadilan yang perlu didukung keberadaannya, sehingga permohonan pembangunan gedung kantor Dilmil Jayapura, PA Temanggung, PA Kuningan, PA Tuban, dan PT TUN Medan dapat disetujui Presiden dengan pertimbangan telah memenuhi syarat administrasi dan keadaan *existing* yang mendesak untuk diberikan persetujuan.



**Gambar 3.6 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Permohonan Izin Pembukaan Moratorium Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan**

4

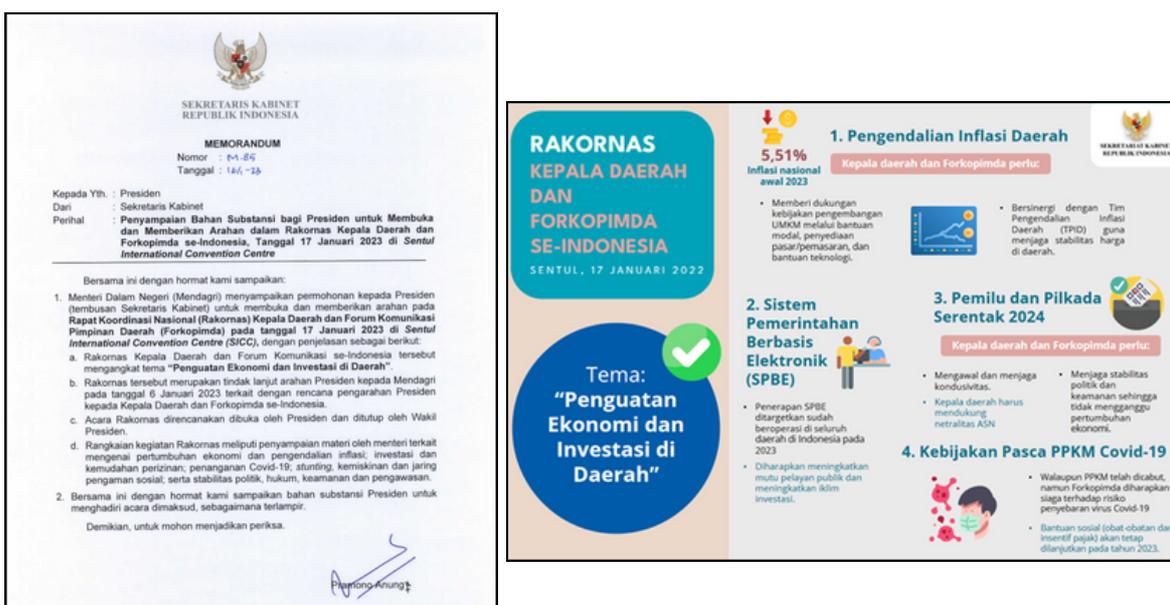
#### **Penyampaian Bahan Substansi bagi Presiden untuk Membuka dan Memberikan Arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia**

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan permohonan kepada Presiden untuk membuka dan memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia pada tanggal 17 Januari 2023 di *Sentul International Convention Centre* (SICC). Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia tersebut mengangkat tema “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi”. Rakornas tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden kepada Mendagri pada tanggal 6 Januari 2023 terkait dengan rencana pengarahan Presiden kepada Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia.

Rangkaian kegiatan Rakornas meliputi penyampaian materi oleh Menteri terkait mengenai pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi; investasi dan kemudahan perizinan; penanganan Covid-19; *stunting*, kemiskinan dan jaring pengaman sosial; serta stabilitas politik, hukum, keamanan dan pengawasan.

Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan bahan yang berisi *pointers* isu-isu strategis yang dapat disampaikan

Presiden antara lain terkait pengendalian inflasi daerah agar dilakukan secara bersinergi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), serta fokus pada persiapan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Selain itu, daerah juga diminta agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap risiko penyebaran virus Covid-19, memastikan penyediaan fasilitas kesehatan yang layak bagi pasien Covid-19, serta tetap melaksanakan vaksinasi hingga seluruh masyarakat mendapatkan.



**Gambar 3.7 Surat Sekretaris Kabinet dan Bahan Substansi bagi Presiden untuk Membuka dan Memberikan Arahan dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda se-Indonesia**

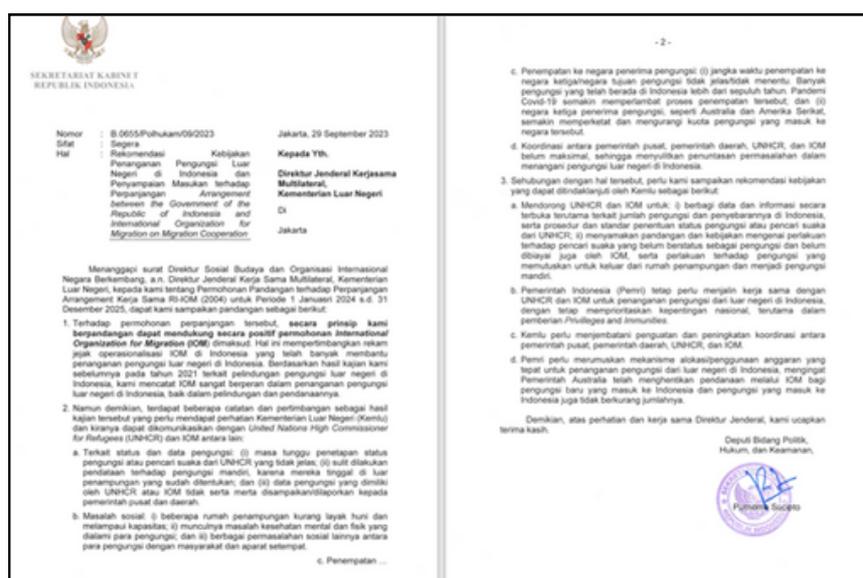
## 5 Penyampaian Saran Masukan terkait Pemanfaatan Kerja Sama antara Pemerintah RI dengan Organisasi Internasional di Indonesia

Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan saran dan pertimbangan terhadap Permohonan Pandangan dari Kementerian Luar Negeri terkait Perpanjangan *Arrangement* Kerja Sama RI-IOM (2004) untuk Periode 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2025

Terhadap permohonan perpanjangan tersebut, secara prinsip Sekretariat Kabinet berpandangan untuk mendukung secara positif permohonan *International Organization for Migration* (IOM), mempertimbangkan rekam jejak operasionalisasi IOM di Indonesia yang telah banyak membantu penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian sebelumnya pada tahun 2021 terhadap perlindungan pengungsi luar negeri di Indonesia, IOM sangat berperan dalam

penanganan pengungsi luar negeri di Indonesia, baik dalam perlindungan dan pendanaannya. Namun demikian, terdapat beberapa catatan dan pertimbangan sebagai hasil kajian tersebut yang perlu mendapat perhatian Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan kiranya dapat dikomunikasikan dengan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) dan IOM.

Hal-hal yang perlu dikomunikasikan terkait status dan data pengungsi seperti: (i) masa tunggu penetapan status pengungsi atau pencari suaka dari UNHCR yang tidak jelas; (ii) sulitnya dilakukan pendataan terhadap pengungsi mandiri; dan (iii) data pengungsi yang dimiliki oleh UNHCR atau IOM tidak serta merta disampaikan/dilaporkan kepada pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan masalah sosial antara lain: i) beberapa rumah penampungan kurang layak huni dan melampaui kapasitas; ii) munculnya masalah kesehatan mental dan fisik yang dialami para pengungsi; serta iii) berbagai permasalahan sosial lainnya antara para pengungsi dengan masyarakat dan aparat setempat. Selanjutnya, permasalahan terhadap penempatan ke negara penerima pengungsi, yakni: (i) jangka waktu penempatan ke negara ketiga/negara tujuan pengungsi tidak jelas/tidak menentu; dan (ii) negara ketiga penerima pengungsi, seperti Australia dan Amerika Serikat, semakin memperketat serta mengurangi kuota pengungsi yang masuk. Di lain pihak, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM belum maksimal, sehingga menyulitkan penuntasan permasalahan dalam menangani pengungsi luar negeri di Indonesia.



**Gambar 3.8 Surat Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terkait Saran Masukan Pemanfaatan Kerja Sama antara Pemerintah RI dengan Organisasi Internasional di Indonesia**

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Kabinet menyampaikan rekomendasi kebijakan:

- a. Mendorong UNHCR dan IOM untuk berbagi data dan informasi secara terbuka terkait jumlah pengungsi dan penyebarannya di Indonesia serta menyamakan pandangan dan kebijakan mengenai perlakuan terhadap pencari suaka yang belum berstatus sebagai pengungsi, belum dibiayai juga oleh IOM, serta perlakuan terhadap pengungsi yang memutuskan untuk keluar dari rumah penampungan dan menjadi pengungsi mandiri;
- b. Pemerintah RI perlu menjalin kerja sama dengan UNHCR dan IOM untuk penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia, dengan tetap memprioritaskan kepentingan nasional, terutama dalam pemberian *Privileges and Immunities*;
- c. Kemlu perlu menjembatani penguatan dan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, UNHCR, dan IOM; serta
- d. Pemerintah RI perlu merumuskan mekanisme alokasi/penggunaan anggaran yang tepat untuk penanganan pengungsi dari luar negeri di Indonesia.

## 6

### Penyampaian Rekomendasi pada Rapat Pleno Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia Tahun 2023



**Gambar 3.9 Suasana Rapat Pleno Setnas ASEAN Indonesia**

Rapat Pleno Sekretariat Nasional (Setnas) ASEAN Indonesia, yang diselenggarakan tanggal 4 Oktober 2023, menyosialisasikan dan mengidentifikasi rencana tindak lanjut dari hasil penyelenggaraan Rangkaian KTT ke-43 ASEAN dan KTT Terkait Lainnya di Jakarta, tanggal 5 – 7 September 2023. Beberapa hal pokok yang mengemuka dalam rapat antara lain (i) pada Keketuaan Indonesia kali ini, ASEAN berhasil mengesahkan dokumen ASEAN *Concord IV* sebagai fondasi bagi Visi

ASEAN 2045 guna menentukan arah pembangunan ASEAN ke depan. Dokumen Visi ASEAN 2045 rencananya akan diadopsi pada tahun 2025; (ii) Timor Leste secara prinsip telah diterima menjadi anggota ASEAN dan berpartisipasi dalam kegiatan ASEAN, namun belum terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Selanjutnya, ASEAN masih perlu membuat peta jalan keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN; dan (iii) ASEAN menyepakati bahwa gedung ASEAN *Secretariat* akan bertransformasi menjadi ASEAN *Headquarters* (ASEAN HQ) sebagai bagian dari diplomasi dan penguatan sentralitas ASEAN di Jakarta. ASEAN *Secretariat* nantinya akan menjadi bagian dari ASEAN HQ bersama ASEAN *Centre* lainnya.

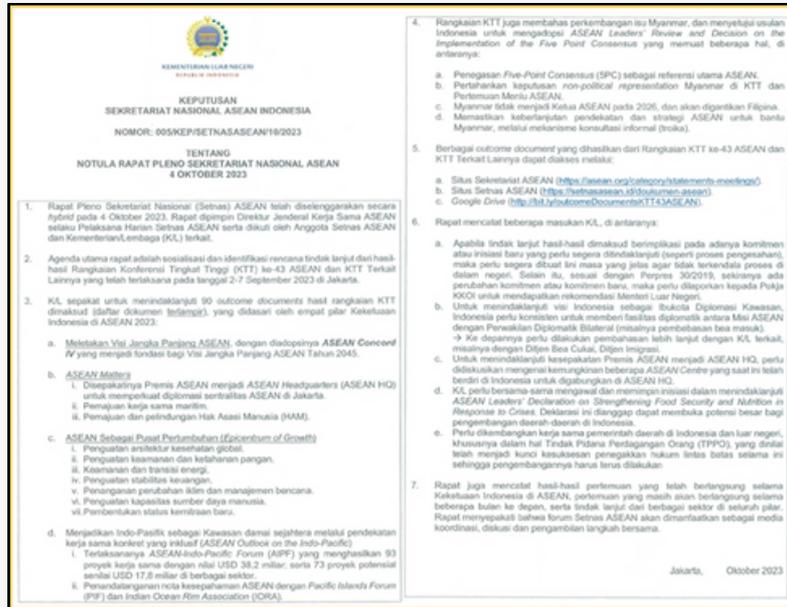
Sekretariat Kabinet sebagai salah satu anggota Setnas ASEAN Indonesia pada Pilar Masyarakat Politik dan Keamanan ASEAN turut terlibat dan berpartisipasi aktif dalam Rapat Pleno tersebut dengan menyampaikan beberapa masukan, yaitu (i) rencana pendirian ASEAN HQ perlu dibahas lebih mendalam secara internal, terutama dalam kaitan mengintegrasikan berbagai ASEAN *Centre* lainnya sehingga memudahkan proses penyusunan *Host Country Agreement (HCA)* dan standarisasi pemberian *Privileges and Immunities (P&I)* terhadap perwakilan ASEAN di Indonesia; dan (ii) Kemlu perlu melakukan penataan mekanisme tata kelola hubungan antara instansi penjuror induk yaitu Kemlu dengan instansi penjuror pada berbagai badan subsider ASEAN. Tata kelola ini mencakup pada perencanaan pemanfaatan hingga implementasinya.



**Gambar 3.10 Keikutsertaan Perwakilan Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam Rapat Pleno Setnas ASEAN Indonesia**

Masukan Setkab tersebut kemudian diakomodasi oleh Setnas ASEAN Indonesia melalui Keputusan Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia Nomor: 005/KEP/SETNASASEAN/10/2023 tentang Notula Rapat Pleno Sekretariat Nasional

ASEAN 4 Oktober 2023, yaitu “Untuk menindaklanjuti kesepakatan Premis ASEAN menjadi ASEAN HQ, perlu didiskusikan mengenai kemungkinan beberapa ASEAN Centre yang saat ini telah berdiri di Indonesia untuk digabungkan di ASEAN HQ”.



**Gambar 3.11 Keputusan Sekretariat Nasional ASEAN Nomor 005/KEP/SETNASASEAN/10/2023**

➤➤➤ **Rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.**



**Gambar 3.12 Piagam Penghargaan Mitra Strategis dalam Pembentukan Perundang-Undangan Tahun 2023**

Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah mendapatkan penghargaan dari Menteri Hukum, dan Hak Asasi Manusia sebagai “Mitra Kerja Strategis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023”. Penghargaan tersebut diberikan pada saat perwakilan Sekretariat Kabinet menghadiri kegiatan Anugerah Legislasi Tahun 2023, Rapat Kerja Teknis Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, dan

Kongres Ikatan Perancang Perundang-undangan Indonesia (IP3I). Hal ini menggambarkan bahwa Sekretariat Kabinet telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden.

Berikut contoh rekomendasi yang dihasilkan terkait rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga:

### **1 Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman**

Plh. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban melalui surat nomor: B-5534/1/LPSK/11/2023 tanggal 28 November 2023 kepada Presiden menyampaikan permohonan persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman (RPerLPSK). RPerLPSK merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 12A ayat (1) huruf f UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara garis besar substansi RPerLPSK memuat ketentuan mengenai standar yang ditetapkan untuk rumah aman/tempat yang ideal untuk memberikan perlindungan kepada saksi/dan atau korban, saksi pelaku, dan ahli, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu tindak pidana, serta ketentuan terkait tata cara pemberian perlindungan di rumah aman.

Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman telah melalui proses pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan konsepsi baik dari segi substansi, teknik penyusunan, maupun prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Proses rapat harmonisasi antara LPSK sebagai pemrakarsa, Kemenkumham, dan Setkab dilaksanakan beberapa kali dengan melibatkan instansi terkait yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KPK, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, BNPT, dan Pemprov DKI Jakarta.

Rancangan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pengelolaan Rumah Aman berdampak luas bagi kehidupan di masyarakat dan bersifat lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga, sehingga memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala



dan bertujuan untuk memberikan peningkatan manfaat jaminan kesehatan yang setara dan layak melalui mekanisme jaminan kesehatan paripurna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diantaranya mencakup: (i) peningkatan manfaat jaminan kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan RI beserta keluarganya di negara penerima dan negara lain, (ii) evakuasi medis, (iii) repatriasi atau pemulangan jenazah, dan (iv) pelayanan kesehatan dalam kondisi wabah dan kejadian luar biasa sepanjang tidak dijamin oleh program lain. Permenlu juga berisikan ketentuan mengenai pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap manfaat pelayanan kesehatan dan Badan Penyelenggara peningkatan manfaat jaminan kesehatan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya.

RPermenlu telah ditetapkan melalui Permenlu Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan Bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Beserta Keluarga. Pada saat pembahasan rancangannya, Permenlu tersebut dinilai memenuhi kriteria lintas sektor atau lintas kementerian/lembaga dan memiliki dampak luas bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 ayat 2 Perpres Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, sehingga perlu mendapatkan Persetujuan Presiden sebelum ditetapkan oleh Menlu.

Selanjutnya, Presiden memberikan persetujuan terhadap Permenlu tersebut dan telah ditindaklanjuti oleh Seskab kepada Menlu melalui surat Nomor: B.0277/Seskab/Polhukam/05/2023 Tanggal 30 Mei 2023.



**Gambar 3.14 Surat Seskab perihal Persetujuan Presiden atas RPermenlu tentang Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan RI di Luar Negeri**

**3**

### **Permohonan Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.**

Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor: 100.4.3/4674/SJ tanggal 1 September 2023 menyampaikan kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (RPermendagri Pedoman Penyusunan APBD TA 2024). Penyusunan RPermendagri tersebut guna melaksanakan ketentuan Pasal 308 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Pasal 89 ayat (2) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP Pengelolaan Keuangan Daerah). RPermendagri dimaksud telah selesai dilakukan harmonisasi di Kemenkumham sebagaimana tertuang dalam surat Dirjen PP Kemenkumham Nomor: PPE.PP.01.05-1465 tanggal 15 Agustus 2023.

Sekretariat Kabinet terlibat pembahasan RPermendagri Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 pada forum PAK tanggal 16 Mei dan 7 Juni 2023, serta pada forum harmonisasi tanggal 8 Agustus 2023. Ruang lingkup pedoman penyusunan APBD TA 2024 meliputi sinkronisasi kebijakan Pemda dengan kebijakan pemerintah pusat; prinsip penyusunan APBD; kebijakan penyusunan APBD; teknis penyusunan APBD; dan hal khusus lainnya, yakni ketentuan dan dukungan anggaran yang spesifik berkaitan dengan pelaksanaan urusan konkuren yang menjadi kewenangan Pemda provinsi maupun kabupaten/kota.

Sekretariat Kabinet berpendapat substansi yang diatur dalam RPermendagri Pedoman Penyusunan APBD TA 2024 tidak terdapat permasalahan, sehingga RPermendagri tersebut dapat dipertimbangkan untuk disetujui Presiden. Setkab telah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan surat Sekretaris Kabinet Nomor B.0454/Seskab/Polhukam/09/2023 tanggal 12 September 2023 kepada Menteri Dalam Negeri guna menyampaikan persetujuan Presiden dan memorandum Sekretaris Kabinet kepada Presiden untuk melaporkan permohonan dimaksud.



**Gambar 3.15 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.**

**4**

### **Permohonan Persetujuan Presiden terhadap Rancangan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara**

Kepala BNPP melalui surat nomor: HKM.35.02/1562/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023, dan Sekretaris BNPP nomor: HKM.35.03/1595/VII/2023 tanggal 25 Juli 2023, mengajukan permohonan kepada Presiden untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan BNPP dimaksud pada pokok memo (R-PerBNPP). Urgensi R-PerBNPP: 1) Perlu pelibatan masyarakat perbatasan negara dalam menjaga tapal batas negara, mengingat penetapan dan penegasan batas wilayah negara dengan negara tetangga belum seluruhnya tuntas, dalam kurun 6 bulan (juni 2021-Januari 2022) ratusan patok batas wilayah negara hilang, dan personil penjaga perbatasan minim (rasio RI-RDTL: 0,4 km/orang, RI-PNG: 0,5 km/orang, dan RI-Malaysia: 1,2 km/orang); 2) Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan dari sisi frontier (sisi dalam sepanjang batas wilayah negara) perlu dikelola melalui pemberdayaan masyarakat dalam menjaga dan memelihara tanda batas wilayah negara; dan 3) Perlu dasar hukum pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa terdepan perbatasan negara dalam mendukung penjagaan tanda batas negara.



**Gambar 3.16 Surat Sekretaris Kabinet perihal Persetujuan Presiden atas Rancangan Peraturan BNPP tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan Negara dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara.**

Seluruh muatan substansi R-PerBNPP telah dicermati Sekretariat Kabinet secara komprehensif disertai saran penyempurnaan guna memastikan agar: 1) Substansi R-PerBNPP selaras dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan Mendagri terkait kewenangan pembinaan pemerintah desa dan LKD; 2) Penyelenggaraan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa terdepan kawasan perbatasan negara oleh BNPP sesuai lingkup tugas dan fungsi BNPP dalam pengelolaan BWN-KP; dan 3) Pendefinisian substansi dalam ketentuan umum serta perumusan norma selaras dengan makna dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Mendagri terkait kewenangan pembentukan LKD serta pembinaan berjenjang oleh pemerintah desa dan pemerintah daerah (kabupaten, kota, dan provinsi) yang memiliki wilayah sisi *frontier* kawasan perbatasan negara.

Melaksanakan amanat Pasal 4 Perpres No. 68 Th. 2021 tentang Pemberian Persetujuan Presiden Terhadap Rancangan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, R-PerBNPP telah beberapa kali dibahas bersama seluruh K/L terkait dalam forum harmonisasi di bawah koordinasi Kemkumham, guna pembulatan serta pemantapan secara teknis, substantif, maupun prosedur penyusunan PUU. Substansi R-PerBNPP bersifat strategis (terkait bidang pertahanan, keamanan, dan keuangan negara), berdampak luas bagi kehidupan masyarakat di 222 kecamatan wilayah perbatasan negara, serta bersifat lintas sektor, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perpres No. 68 Th. 2021 terlebih dahulu perlu mendapat persetujuan Presiden, sebelum

ditetapkan Kepala BNPP. Mengingat substansi R-PerBNPP sudah tidak mengandung permasalahan, kami berpendapat R-PerBNPP dimaksud dapat dipertimbangkan secara positif untuk diberikan persetujuan Presiden, sebelum ditetapkan oleh Kepala BNPP.

## Sasaran 2

Sasaran 2 “Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan” diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu “Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti” dan “Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan yang ditindaklanjuti”. Berdasarkan capaian pada laporan rencana kinerja bulanan dan aplikasi SIKT tahun 2023, Deputi Politik, Hukum, dan Keamanan telah menghasilkan 10 rekomendasi untuk indikator 1 dan 23 rekomendasi untuk indikator 2. Adapun rekomendasi tersebut dalam bentuk memorandum yang disampaikan kepada Presiden dan/atau surat yang disampaikan kepada Menteri/Kepala Lembaga. Dari total 33 rekomendasi yang dihasilkan telah seluruhnya dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh *stakeholder*. Jika dihitung berdasarkan formulasi rumus pada masing-masing indikator yang telah dijabarkan pada Bab II didapatkan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Realisasi Sasaran 2**  
**Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

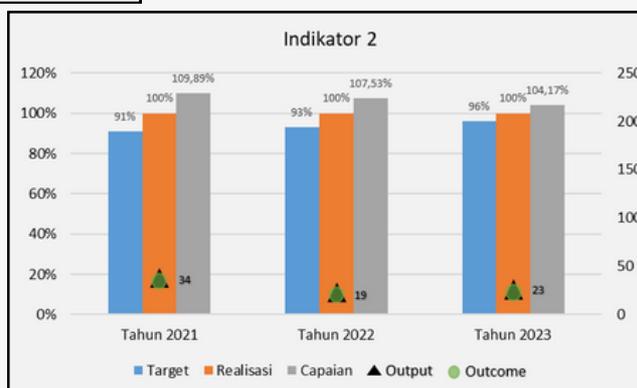
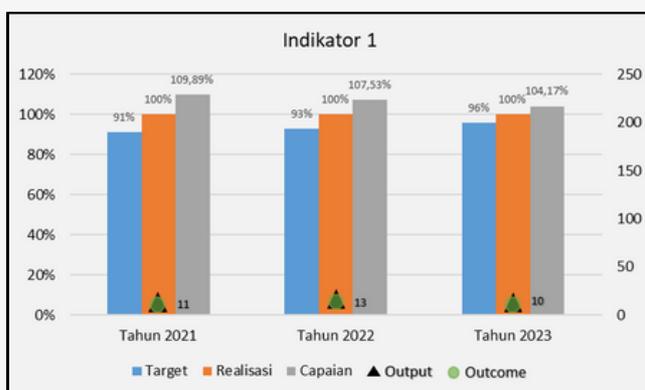
INDIKATOR	OUTPUT	OUTCOME	REALISASI
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas kebijakan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	10	10	100%
Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	23	23	100%
<b>TOTAL</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan realisasi yang dihasilkan setiap indikator pada sasaran 2 jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai pada tahun 2023 yaitu 96% didapatkan capaian kinerja sebagai berikut:

**Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 2  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas kebijakan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104.17%
Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pemerintahan dalam negeri yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dan sesuai ketentuan	96%	100%	104.17%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>104.17%</b>

Jika dibandingkan dengan besaran persentase capaian kinerja pada tahun sebelumnya didapatkan data sebagai berikut:



**Gambar 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran 2  
Tahun 2021 s.d 2023**

Capaian Indikator pada Sasaran 2 tahun 2023 tergambar menurun dari tahun sebelumnya meskipun realisasi yang dilakukan mencapai 100%, hal ini disebabkan oleh kenaikan target sebesar 3% dari tahun 2022 yaitu dari 93% menjadi 96%, sehingga mempengaruhi rumus perhitungan pembagi capaian kinerja. Adapun secara kualitas rekomendasi yang dihasilkan tidak mengalami penurunan karena baik pada tahun 2022 maupun tahun 2023 semua rekomendasi telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti oleh *stakeholder*.

Sebagai gambaran pencapaian indikator kinerja pada sasaran 2, berikut ini beberapa rekomendasi yang dihasilkan Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang telah dimanfaatkan/ditindaklanjuti *stakeholder*.

 **Rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang politik, hukum, dan keamanan.**

 **Rekomendasi terkait Penyelesaian Masalah di Bidang Politik, Ekonomi, maupun Sosial Budaya berkenaan dengan Penyusunan, Ratifikasi, dan Pelaksanaan Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Mitra**

Dalam rangka melaksanakan fungsi penyiapan pengkajian dan pemberian rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, serta fungsi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan koordinasi dan berdiskusi dengan Kemlu terkait Penyusunan, Ratifikasi, dan Pelaksanaan Perjanjian Bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara Mitra, dan diperoleh informasi bahwa Kemlu telah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap status perjanjian internasional (PI) yang ditandatangani oleh Pemerintah RI sejak tahun 2018 dengan melibatkan K/L terkait:

- a. Tercatat 1508 perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara mitra telah ditandatangani pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Oktober 2014 s.d. November 2023), dengan perincian: 1109 PI masih berlaku, 78 belum berlaku, dan 321 sudah tidak berlaku. Tercatat kurang lebih 108 PI ditandatangani saat kunjungan Presiden ke negara mitra. Selain 1508 perjanjian bilateral, terdapat juga 328 PI non bilateral yang telah ditandatangani di era Pemerintahan Joko Widodo,



dengan perincian: 183 PI dengan organisasi internasional, 8 PI trilateral, 55 PI regional dalam kerangka ASEAN, 17 PI multilateral, dan 65 kerja sama internasional non-PI.

- b. Dari 321 perjanjian bilateral yang sudah tidak berlaku, selain karena masa berlakunya telah habis, terdapat juga perjanjian yang tidak bisa diimplementasikan karena beberapa alasan, yaitu: (i) kendala internal pada K/L pemrakarsa (keterbatasan anggaran, perubahan prioritas, aturan internal, pergantian struktur organisasi atau unit penanggung jawab, serta kurangnya perencanaan untuk merealisasikan target-target PI); (ii) adanya perubahan peraturan nasional; atau (iii) sudah terlalu lampau ditandatangani namun tidak segera diratifikasi atau tidak diimplementasikan.
- c. Kemlu menyampaikan mengalami beberapa kendala dan tantangan terkait penyusunan, ratifikasi, dan pelaksanaan PI, khususnya berkenaan dengan koordinasi lintas K/L, antara lain: (i) tidak semua K/L pemrakarsa memiliki pemahaman yang sama terkait prosedur, (ii) belum adanya mekanisme pemutakhiran informasi antara Kemlu dengan K/L mengenai implementasi PI, dan (iii) K/L belum memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi PI yang terstruktur.

Sekretariat Kabinet melalui Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyampaikan beberapa catatan dan pengamatan dalam rangka penyusunan rekomendasi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan, sebagai berikut:

- a. Pengawasan yang dilakukan Kemlu terhadap penyusunan naskah perjanjian bilateral selama ini masih dominan pada *legal drafting* dan *legal scrubbing*. Perlu dioptimalkan peran Kemlu dalam melakukan pengawasan terhadap substansi naskah perjanjian, khususnya berkenaan dengan kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan nasional, kapasitas keuangan negara, irisan kewenangan K/L lain, dan unsur lainnya.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi PI yang selama ini dilakukan Kemlu baru sebatas mencatat secara jumlah dan menyajikan data secara umum, belum menyentuh pada evaluasi dan penilaian terhadap efisiensi dan efektivitas implementasi PI maupun pemanfaatan kerja sama internasional.
- c. Masih terdapat K/L yang belum menyampaikan naskah asli PI yang telah ditandatangani kepada Kemlu karena belum ada kesamaan pemahaman dalam prosedur penyusunan, penandatanganan, ratifikasi, dan pemberlakuan PI.

- 
- d. Kemlu juga sebelumnya menemukan adanya PI yang belum berlaku namun sudah diimplementasikan karena adanya miskonsepsi terhadap prosedur internal pemberlakuan PI oleh kementerian/lembaga pemrakarsa.
  - e. Miskonsepsi terhadap pemberlakuan PI salah satunya dipengaruhi kerancuan pemahaman terkait "pengesahan". Hal ini menjadi salah satu muatan yang akan diubah dalam RUU tentang Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang saat ini masih bergulir pembahasan dan penyusunannya

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Sekretariat Kabinet mencatat beberapa saran masukan dan rekomendasi serta menyampaikannya melalui surat Sekretaris Kabinet kepada Menteri Luar Negeri, antara lain mengenai:

- a. Kemlu agar secara reguler melakukan sosialisasi kepada K/L berkenaan dengan tata cara penyusunan, ratifikasi, dan pemberlakuan perjanjian internasional, khususnya perjanjian bilateral antara Pemerintah RI dengan negara mitra.
- b. Mengoptimalkan peran Kemlu dalam melakukan pengawasan terhadap penyusunan naskah perjanjian agar lebih dari sekadar *legal drafting* dan *legal scrubbing*.
- c. Perlu disusun panduan monitoring dan evaluasi bagi K/L terkait pelaksanaan PI, khususnya perjanjian bilateral dengan negara mitra, serta lebih mendorong monitoring dan evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas implementasi perjanjian.
- d. Kemlu berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator untuk mendorong kementerian/lembaga melaporkan perkembangan penyusunan, ratifikasi, dan pelaksanaan perjanjian bilateral yang diprakarsai, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden RI melalui Menlu, serta mendorong kementerian/lembaga terkait segera menyampaikan naskah asli perjanjian yang masih disimpan internal kepada Kemlu.
- e. Hasil monitoring dan evaluasi PI Tahun 2023 dan 2024 agar kiranya dilaporkan kepada Presiden RI.



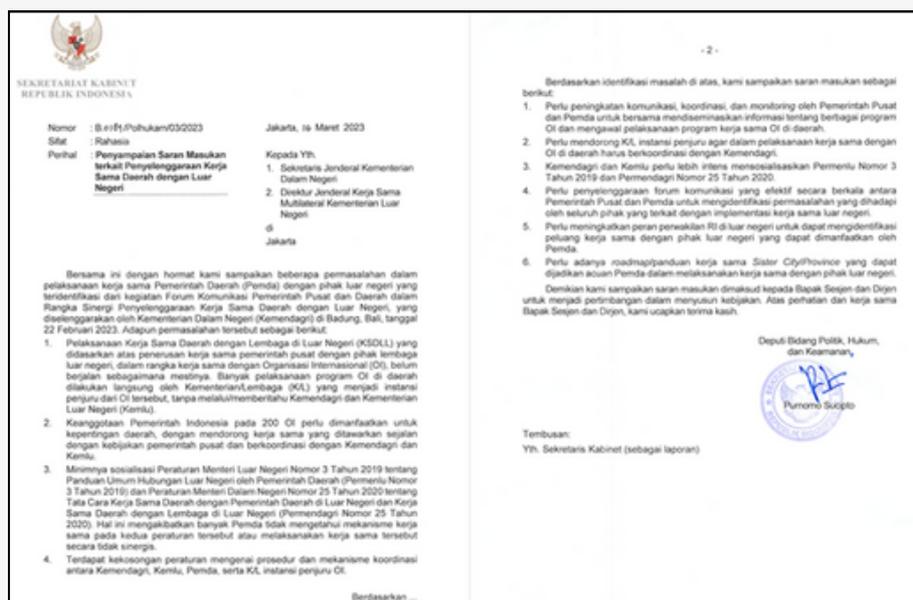
**Gambar 3.18 Surat Sekretaris Kabinet perihal Penyelesaian Masalah di Bidang Politik, Ekonomi, maupun Sosial Budaya.**

**2**

**Penyampaian Saran Masukan terkait Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri**

Beberapa permasalahan umum yang sering dihadapi dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak luar negeri, antara lain: (i) kurangnya pemahaman aparat pengelola kerja sama luar negeri pada Pemda akan peraturan perundang-undangan terkait mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan kerja sama; (ii) kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait dalam proses pelaksanaan kerja sama; dan (iii) kurangnya keberlanjutan hasil kerja sama. Lebih lanjut, Kedeputian Bidang Polhukam mengidentifikasi beberapa permasalahan khusus dalam pelaksanaan kerja sama Pemda dengan pihak luar negeri, berikut: (i) Kemendagri kurang memberikan perhatian terhadap Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) yang didasarkan atas penerusan kerja sama pemerintah pusat dengan pihak lembaga luar negeri (ii) Perlunya optimalisasi pemanfaatan oleh Pemerintah Indonesia yang saat ini tergabung pada lebih dari 200 OI; (iii) Sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara Pemda dengan pihak luar negeri, baik pengaturan maupun implementasi Permenlu 3/2019 dan Permendagri 25/2020 masih berjalan sendiri-sendiri; (iv) Minimnya sosialisasi Permenlu 3/2019 dan Permendagri 25/2020; dan (v) Masih terdapat kekosongan peraturan yang mencakup prosedur dan mekanisme koordinasi antara Kemlu, Kemdagri, Pemda, serta K/L instansi penjuror OI yang ada di Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut, melalui surat Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Nomor: B.0184/Polhukam/03/2023 tanggal 16 Maret 2023 kami sampaikan saran masukan kepada pihak terkait sebagai berikut: (i) Perlu disusun panduan/*roadmap* terkait kerja sama *Sister City/Province*; (ii) Perlu peningkatan dan penguatan komunikasi, koordinasi, dan monitoring antara Pemerintah Pusat dan Pemda untuk bersama mengawal pelaksanaan program kerja sama pihak lembaga di luar negeri, khususnya OI, di daerah; (iii) Kemlu perlu melakukan sosialisasi aktif dan masif kepada K/L instansi penjurur; (iv) Perlu penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemda; (v) Kemlu dan Kemendagri perlu untuk lebih intens berkoordinasi dan berkolaborasi dalam rangka mensosialisasikan dan mensinergikan implementasi Permenlu 3/2019 dengan Permendagri 25/2020; (vi) Perlu meningkatkan peran perwakilan RI di luar negeri untuk dapat mengidentifikasi peluang-peluang kerja sama dengan pihak luar negeri yang dapat dimanfaatkan oleh Pemda; serta (vii) Perlu penyelenggaraan forum komunikasi rutin antara Pemerintah Pusat dan Pemda.



**Gambar 3.19 Surat Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan perihal Penyampaian Saran Masukan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri**

### 3 Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat

Presiden telah mengeluarkan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat. Penerbitan Inpres dan Keppres

tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat (PPHAM) yang telah melaksanakan amanat sebagaimana ditetapkan dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat Masa Lalu.

Sepanjang Tahun 2023, dalam rangka pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat terhadap 12 Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat, Pemerintah melalui Tim Pelaksana Pemantau Rekomendasi PPHAM telah melaksanakan kegiatan peluncuran program pemulihan di Aceh yang dihadiri oleh Presiden, DKI Jakarta, dan Palu. Pada acara tersebut, korban dan/atau ahli waris telah menerima sejumlah bantuan seperti Kartu Indonesia Sehat Prioritas, Program Keluarga Harapan, Paket Sembako dan Uang Tunai, serta bantuan terpersonalisasi sesuai kebutuhan hasil inventarisasi seperti program pelatihan kerja, beasiswa, alat pertanian, bibit ternak, dan/atau renovasi rumah. Disamping itu, pemberian program pemulihan juga telah dilaksanakan di luar negeri, yaitu Republik Ceko dan Belanda untuk korban/keluarga korban yang bertempat tinggal di luar Indonesia berupa pembebasan biaya layanan keimigrasian. Namun demikian, dalam pelaksanaan pemberian program pemulihan, terdapat sejumlah hambatan yang menjadi tantangan, diantaranya terkait dengan verifikasi dan validasi data korban/keluarga korban dan koordinasi dengan kementerian teknis dalam rangka pemberian program pemulihan.



**Gambar 3.20 Kolase Kegiatan Koordinasi dan Evaluasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat**



Disamping itu, dalam rangka memberikan rekomendasi alternatif terhadap penyelesaian non-yudisial Pelanggaran HAM yang Berat, telah dilaksanakan kegiatan pemantauan ke Semarang untuk memperoleh informasi dari para narasumber yang memiliki kompetensi terkait penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM yang berat pasca terbitnya Inpres Nomor 2 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023. Hasil dari kegiatan tersebut, antara lain bahwa upaya bina damai (*peace building*) untuk menyelesaikan kekerasan struktural sebagaimana terjadi pada 12 Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat dapat diinisiasi secara non-yudisial melalui pengungkapan kebenaran; dan menyusun suatu formula yang dapat memberikan jaminan ketidakberulangan sebagai salah satu bentuk reparasi yang bersifat *preventif* dalam penyelesaian PHB.

 **Rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang politik, hukum, dan keamanan.**

**1 Laporan Hasil Peninjauan Perkembangan Pembangunan Lembaga Masyarakat di Pulau Nusakambangan.**

Kegiatan pemantauan pembangunan lembaga masyarakat (lapas) di Pulau Nusakambangan merujuk pada Arahan Presiden dalam Rapat Terbatas tanggal 22 Mei 2018 yang memerintahkan pembangunan 5 lapas baru di Pulau Nusakambangan guna mengatasi masalah overkapasitas di lembaga masyarakat. Untuk menindaklanjuti Arahan Presiden tersebut, Setkab telah melaksanakan kegiatan pemantauan ke Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, pada tanggal 6 s.d. 8 Desember 2023 untuk meninjau perkembangan pembangunan 5 lapas di Pulau Nusakambangan, yaitu:

1. Lapas Kelas IIA Nirbaya dengan kategori *Minimum Security*;
2. Lapas Kumbang dengan kategori *Minimum Security*;
3. Lapas Kelas IIA Ngaseman dengan kategori *Maximum Security*;
4. Lapas Kelas IIA Gladakan dengan kategori *Maximum Security*; dan
5. Lapas Kelas IIA Karanganyar dengan kategori *Supermaximum Security*.

Hasil pemantauan yang diperoleh adalah bahwa secara umum Menteri Hukum dan HAM. Dirjen Masyarakat telah melaksanakan Arahan Presiden dengan baik. Pembangunan ke-5 lapas baru di Pulau Nusakambangan telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang sesuai standar, serta didukung oleh sistem

pengamanan yang berbasis teknologi (terdapat CCTV, *control room*, dan alat X-Ray). Namun demikian, pelaksanaan fungsi pemasyarakatan di Pulau Nusakambangan masih terkendala, yaitu:

1. Belum jelasnya wewenang pengelolaan dan pemanfaatan Pulau Nusakambangan, sebab Pulau Nusakambangan masih digunakan oleh beberapa kementerian/lembaga dan pemerintah daerah; dan
2. Kurangnya pengawasan terhadap lalu-lintas keluar masuk orang dari dan ke Pulau Nusakambangan, sebagai akibat dari terbukanya akses melalui Pangandaran.

Untuk mengantisipasi kendala tersebut, Kemenkumham sebenarnya telah melakukan upaya dan langkah pengamanan, yaitu mengusulkan Pulau Nusakambangan sebagai wilayah khusus pemasyarakatan membuat kajian mengenai rencana pembentukan Otorita Khusus Pemasyarakatan dan merencanakan pembangunan lapas tambahan di wilayah ujung timur dan ujung barat Pulau Nusakambangan.



**Gambar 3.21 Kegiatan Peninjauan di Lapas Khusus Kelas IIA Karanganyar, Pulau Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah**

Terhadap kendala tersebut, Sekretariat Kabinet berpendapat bahwa apabila Presiden telah memberikan banyak perhatian pada permasalahan overkapasitas dan sudah terdapat banyak pembangunan lapas di Pulau Nusakambangan, seyogianya memang Pulau Nusakambangan dijadikan suatu wilayah khusus bagi pemasyarakatan, termasuk didalamnya perlu mempertimbangkan risiko keamanan bagi warga sekitar dan petugas pemasyarakatan. Namun demikian, permasalahan tersebut perlu dibahas dengan menteri/kepala lembaga terkait dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden.

## 2

### Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik

Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna tanggal 7 Januari 2019 menyampaikan arahan agar pelayanan publik, perizinan, dan kemudahan berusaha yang langsung berdampak terhadap masyarakat, benar-benar ditingkatkan perbaikannya. Perbaikan tersebut salah satunya dilakukan dengan melakukan reformasi birokrasi pada pelayanan publik melalui penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP merupakan pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Sampai dengan bulan Desember 2023, ditargetkan akan terbentuk 175 (seratus tujuh puluh lima) MPP. Keberadaan MPP ini menjadi bentuk konkret hasil kolaborasi antar sektor dan mempercepat integrasi penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas bagi masyarakat.

Dalam rangka memastikan penyelenggaraan MPP di daerah berjalan dengan baik sesuai dengan arahan Presiden dan Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik, Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada tahun 2023 telah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi Mal Pelayanan Publik ke Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; dan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat.



**Gambar 3.22 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik**



Berdasarkan hasil kegiatan pemantauan dan evaluasi, terhadap MPP yang sudah terbangun baik, perlu dievaluasi berkala untuk upaya penyempurnaan, sehingga reformasi birokrasi yang dilaksanakan dapat langsung berdampak dan dirasakan masyarakat. Sedangkan untuk MPP yang masih dalam proses “mengejar” ketertinggalan perlu diberikan pembinaan sesuai kebutuhan masing-masing. Selain itu terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Kementerian PANRB, yaitu:

1. Tindak lanjut hasil PEKPPP tahun 2022, terutama terhadap performa penyelenggara pelayanan publik di pemda (DPMPTSP) dan kesiapannya menghadapi target dan kebijakan pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Menteri PANRB. Dalam pelayanan publik, target *output* utama yang dikejar yaitu: tersedianya kebijakan pelayanan publik digital, tersedianya MPP digital (dilaksanakan oleh pemda sebesar 100% pada tahun 2024), terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pelayanan publik digital dan MPP digital.
2. Pengecekan dan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan sehingga dapat memadai demi terselenggaranya proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan sebagai instrumen utama.
3. Dalam laporan hasil PEKPPP tahun 2022 yang disampaikan kepada Presiden, dapat kami sampaikan, masih perlunya atensi peningkatan pelayanan publik di wilayah Indonesia timur dan perlu dilanjutkan dengan percepatan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang sesuai dengan sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, dan kekhususan wilayah.

**3**

### **Rekomendasi Kebijakan terkait Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah**

Sekretariat Kabinet telah melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan komunikasi publik pemerintah melalui kegiatan diskusi baik bersama akademisi dan praktisi serta pemerintah daerah guna memotret efektivitas tata kelola komunikasi publik pemerintah sekaligus memperoleh masukan sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pengelolaan komunikasi publik pemerintah ke depan. Sejak tahun 2015 Presiden telah mengeluarkan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, yang secara khusus memberi instruksi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk menyusun narasi tunggal terkait

dengan kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai arahan Presiden. Namun demikian, dalam implementasinya pola tersebut masih belum optimal dalam mendukung peningkatan keberhasilan kabinet, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah.

Berdasarkan kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut, Sekretariat Kabinet melalui Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merekomendasikan:

1. perlu dilakukan penataan struktur dan tata kelola komunikasi publik pemerintah dengan prinsip “tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*)” dan “partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*)”. Penyusunan narasi tunggal terkait kebijakan dan program pemerintah kepada publik sesuai Inpres Nomor 9 Tahun 2015 perlu dikaji kembali efektivitasnya dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi;
2. pemanfaatan kanal informasi publik harus dapat memberdayakan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, baik dalam kapasitas pengawasan maupun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan negara itu sendiri;
3. terkait konsep kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan komunikasi publik pemerintah, perlu dikaji lebih mendalam dengan mempertimbangkan masukan lebih banyak lagi dari publik, termasuk relasinya dengan pers dan lembaga penyiaran.



**Gambar 3.23 Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Komunikasi Publik Pemerintah**

**4****Laporan Hasil Pemantauan terkait Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Implementasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri**

Berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama oleh Pemerintah Daerah, Presiden RI memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional APKASI (20 Oktober 2021) dan Rapat Koordinasi Gubernur se-Indonesia (13 Maret 2022) sebagai berikut: Kepala Daerah agar memanfaatkan peluang komoditas melalui penguatan kerja sama antar daerah sekaligus memperluas ekspor ke negara-negara lain serta penguatan kerja sama dalam rangka pelayanan penanggulangan Covid-19, pelaksanaan APBD, dan menghadapi kondisi global.

Menindaklanjuti arahan Presiden dimaksud, Sekretariat Kabinet melaksanakan pemantauan terkait pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap implementasi kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri, serta menyusun kajian mengenai “Optimalisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri bagi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19”.

Penyusunan kajian dilaksanakan melalui pemantauan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (i) Forum Komunikasi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Sinergi Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri pada tanggal 22 Februari 2023 di Bali; (ii) Rapat Evaluasi Kerja Sama *Sister City/Province* bertema “Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendorong Peningkatan Ekonomi dan Investasi” pada tanggal 25 Mei 2023 di Jakarta; (iii) Diskusi dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 13 Desember 2023 di Jakarta; dan (iv) Diskusi dengan Kementerian Luar Negeri pada tanggal 15 Desember 2023 di Jakarta.



**Gambar 3.24 Diskusi bersama Kementerian Dalam Negeri tanggal 13 Desember 2023 di Jakarta**



Kegiatan pemantauan dan penyusunan kajian dimaksud menghasilkan rekomendasi yang turut disampaikan kepada Menteri-Menteri terkait melalui Surat Sekretaris Kabinet, yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri, sebagai masukan bagi pengambilan kebijakan pada masing-masing kementerian, yaitu sebagai berikut:

1. Penyusunan cetak biru/*blueprint* terkait kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri, yang memuat pemetaan potensi daerah, peluang-peluang kerja sama, arah kerja sama, target kerja sama, strategi implementasi kerja sama, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama, sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan untuk melaksanakan kerja sama daerah dengan pihak di luar negeri.
2. Penjajakan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di negara-negara mitra di kawasan non-tradisional, untuk meningkatkan hubungan antar masyarakat, yang akan berkontribusi bagi peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia dengan negara mitra.
3. Peningkatan sinergi dan komunikasi antar instansi Pemerintah Pusat yang terlibat dalam penanganan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri.
4. Penyelenggaraan forum komunikasi secara rutin antar instansi, baik pada tingkat pusat maupun daerah, dengan melibatkan Perwakilan RI di luar negeri, untuk membahas peluang-peluang dan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri.
5. Pembangunan sistem *database* mengenai potensi daerah dan kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri untuk setiap Kabupaten/Kota di Indonesia, guna memberikan informasi kepada calon mitra potensial dan membantu Perwakilan RI di Luar Negeri untuk dapat melaksanakan proses *matchmaking* kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah di luar negeri.
6. Penyusunan buku saku sebagai hasil dari kegiatan monitoring dan evaluasi bersama seluruh instansi terkait di daerah-daerah yang sukses menyelenggarakan kerja sama dengan pihak di luar negeri, untuk menjadi *benchmarking* bagi daerah-daerah lain.
7. Pembuatan *scorecard* capaian kerja sama Pemerintah Daerah dengan pihak di luar negeri secara berkala.

## Sasaran 3

Sasaran ke-3 “Meningkatnya kualitas pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” diukur dengan menggunakan 3 indikator kinerja. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2023 didapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 3.5 Realisasi dan Capaian Kinerja Sasaran 3  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

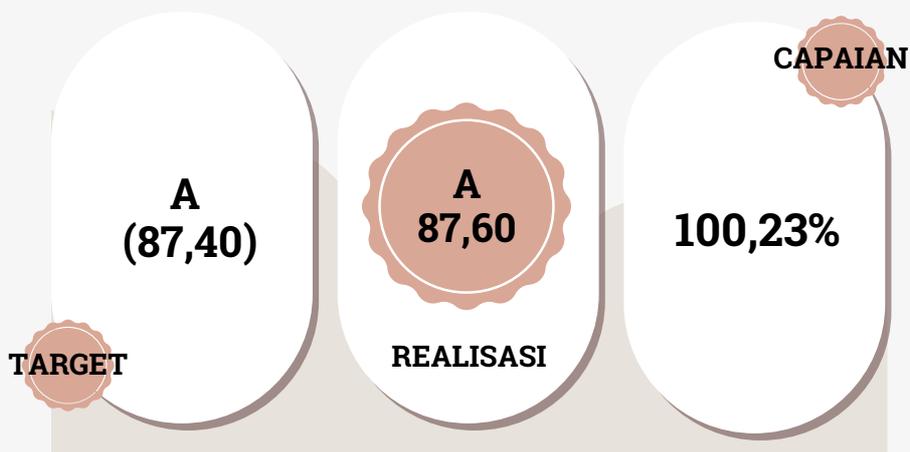
INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Hasil Penilaian SAKIP Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	A (87,40)	A (87,60)	100.23%
Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hasil reuiu Inspektorat	33,97	33.97	100%
Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	90%	99,97%	111.07%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>			<b>103,76%</b>

Untuk Sasaran ke-3 Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendapat nilai rata-rata capaian kinerja sebesar **103,76%** dan termasuk dalam kategori “**Memuaskan**”. Adapun penjelasan lebih rinci terkait capaian sasaran ini adalah sebagai berikut:

### **>>> Hasil Penilaian SAKIP Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwasanya setiap Instansi Pemerintah melakukan reuiu dan evaluasi internal terkait pelaksanaan SAKIP di Kementerian/ Lembaganya. Untuk itu, setiap tahunnya Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dinilai oleh Inspektorat terkait pelaksanaan SAKIP yang telah diterapkan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Internal Kedepuitan Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan Inspektorat melalui memorandum Nomor LHE-I/INSP/09/2023 tanggal 29 September 2023, Nilai SAKIP Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebesar 87,60 dengan kategori A (Memuaskan).



**Gambar 3.25 Capaian Hasil Penilaian SAKIP Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dilingkungan Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.6 Komponen Hasil Penilaian SAKIP Internal**

NO	KOMPONEN	BOBOT	CAPAIAN	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30	90%	27,00
2	Pengukuran Kinerja	30	82%	24,60
3	Pelaporan Kinerja	20	90%	18,00
4	Evaluasi Kinerja	10	90%	9,00
5	Capaian Sasaran	10	90%	9,00
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>		<b>100</b>		<b>87,60</b>

Jika dibandingkan dengan capaian penilaian SAKIP pada Tahun 2022 yaitu 87,40 terdapat kenaikan sebesar 0,20 poin, hal ini dikarenakan adanya perbaikan di setiap komponen penilaian sesuai dengan saran dan masukan laporan SAKIP tahun sebelumnya.



Guna mempertahankan dan meningkatkan nilai akuntabilitas ditahun yang akan datang, terdapat saran dan masukan yang harus ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. pemanfaatan Laporan Kinerja unit kerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebagai *feedback* dan perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja;
- b. menyusun laporan monev kinerja triwulanan; memberikan tanggal penetapan pada Renstra Deputy Bidang Politik, Hukum, dan
- c. Keamanan 2021-2024;
- d. memberikan tanggal penetapan pada LKJ Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2022;
- e. melakukan reviu perencanaan kinerja (contoh reviu renstra);
- f. menyusun dokumen *crosscutting* yang dimanfaatkan Kedeputian lain atau rekomendasi ke Kementerian lain (contoh Deputy Substansi dengan Deputy DKK atau rekomendasi ke Kementerian lain); dan
- g. mengoptimalkan dialog kinerja untuk dimanfaatkan dalam memberikan *feedback* atau masukan dari pimpinan terhadap pencapaian kinerja.

### **Indeks Komponen Pengungkit Penilaian Mandiri RB Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan hasil reviu Inspektorat**

Kementerian PANRB melakukan perubahan mekanisme evaluasi RB Tahun 2023 sebagaimana disampaikan dalam Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan, Kementerian PANRB Nomor B/01/RB.06/2023 tanggal 18 Januari 2023 perihal Perubahan Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 dan Penyampaian Praktik Baik Reformasi Birokrasi. Perubahan mekanisme tersebut diikuti pula dengan perubahan/penyempurnaan *Road Map* RB Tahun 2020-2024 mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan “RB General”, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan “RB Tematik”. Sehingga pada tahun berjalan proses Penilaian Mandiri RB sudah tidak dilakukan dan nilai yang digunakan disamakan dengan nilai tahun 2022.

Pada PMPRB tahun 2022, nilai pengungkit yang diajukan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yaitu 33,97. Nilai tersebut juga telah mencapai target yang dicantumkan pada Perjanjian Kinerja, sebagai berikut:

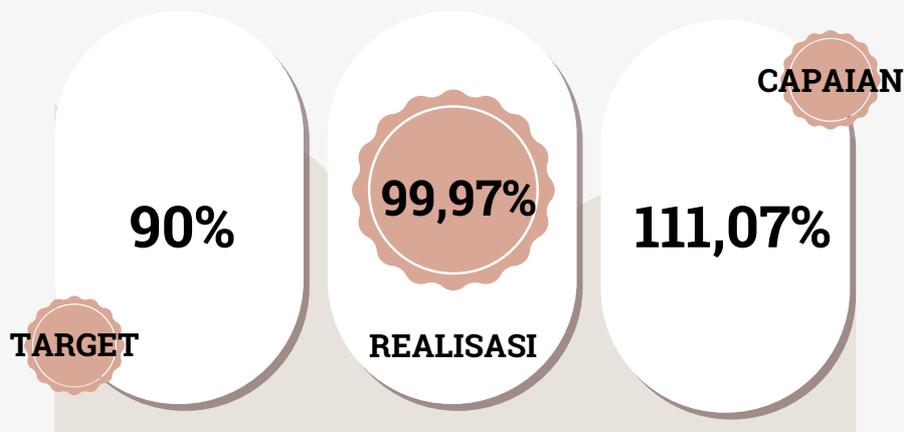


Gambar 3.26 Capaian Penilaian Mandiri RB  
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

### >>> Persentase penyerapan anggaran pada Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

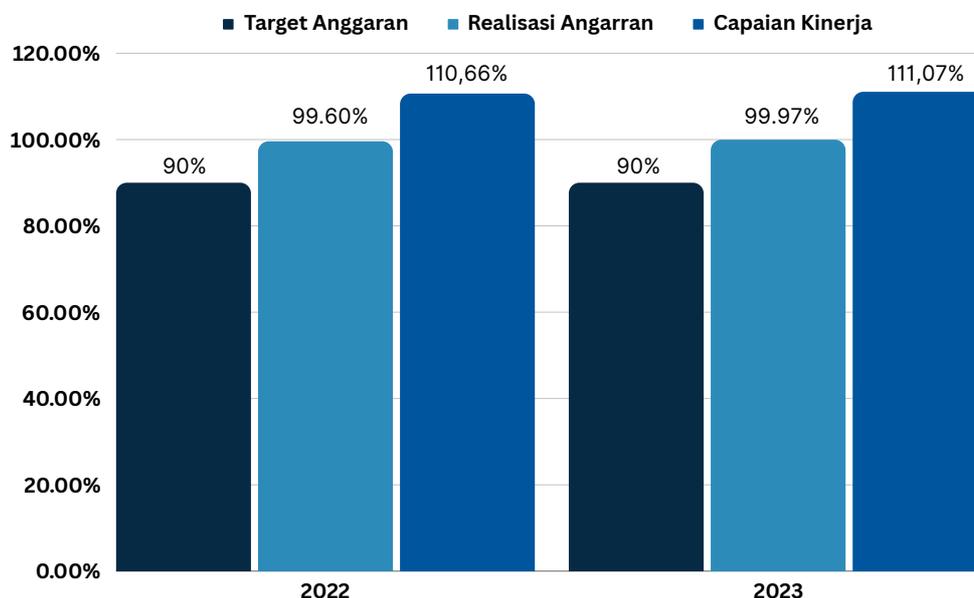
Pada tahun 2023 anggaran Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah), namun seiring dengan adanya kebijakan peralihan anggaran berubah menjadi Rp2.310.616.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yang digunakan untuk mencapai 3 sasaran yang telah diperjanjikan.

Selama Tahun 2023, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terus melakukan upaya untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Adapun realisasi penggunaan anggaran setelah peralihan adalah sebesar **Rp2.309.906.616,00** (dua milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam ribu enam ratus enam belas rupiah) atau sebesar **99,97%**.



Gambar 3.27 Capaian Penyerapan Anggaran  
Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Jika dibandingkan dengan target yang harus dicapai sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor: 5/PB/2022 yaitu 90%, maka capaian kinerja terkait penyerapan anggaran adalah **111.07%**.



**Gambar 3.28 Perbandingan Capaian Penyerapan Anggaran Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Dari gambar diatas terlihat bahwa capaian penyerapan anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, salah satu faktor yang mempengaruhi adalah berakhirnya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih optimal. Jika dibandingkan antara realisasi anggaran dan *output* kinerja yang tercapai seluruhnya dapat dikatakan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah melaksanakan anggaran yang efektif dan efisien, yang berikutnya akan dijelaskan dalam pembahasan analisis penggunaan anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keuangan.

## KEGIATAN LAIN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi untuk membantu Sekretaris Kabinet menyelenggarakan pemberian dukungan manajemen kabinet di bidang politik, hukum, dan keamanan, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan jajarannya selalu berupaya untuk memberikan rekomendasi yang berkualitas. Berikut beberapa gambaran kegiatan yang menunjang terciptanya rekomendasi yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.



## Diskusi Kelompok Terpumpun Mengenai Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok terpumpun mengenai “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintah Daerah” yang dilaksanakan ke 2 tempat yaitu:

1. Diskusi kelompok terpumpun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Kamis, 03 Agustus 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber seperti Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Staf Ahli Bupati Banyumas Bidang Ekonomi dan Pembangunan, dan Pakar dari Universitas Jenderal Soedirman.



**Gambar 3.29** Diskusi Kelompok Terpumpun di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah

2. Diskusi kelompok terpumpun di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Provinsi Bengkulu pada Jumat, 27 Oktober 2023. Kegiatan tersebut dihadiri oleh beberapa narasumber seperti Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Guru Besar Hukum Administrasi Negara, dan Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu.



**Gambar 3.30** Diskusi Kelompok Terpumpun di Provinsi Bengkulu



## Peninjauan atas Rencana Pembangunan Gedung

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan beberapa kali melaksanakan kegiatan peninjauan terhadap permintaan pembangunan gedung diantaranya:

1. Peninjauan permohonan pembangunan gedung kantor imigrasi Kementerian Hukum dan HAM pada Rabu, 7 Juni 2023 di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang, Kota Semarang, Jawa Tengah.



**Gambar 3.31 Peninjauan Rencana Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

2. Pemantauan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis BKN di Kota Bengkulu pada Kamis, 26 Oktober 2023.



**Gambar 3.32 Pemantauan Sarana dan Prasarana Unit Pelaksana Teknis BKN Bengkulu**

3. Pemantauan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Kuningan pada Jumat, 24 November 2023.



**Gambar 3.33 Pemantauan Sarana dan Prasarana Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Kuningan**

**➤ Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Hasil Kajian Dewan Ketahanan Nasional dan Penyikapan Isu-isu Strategis Nasional**

Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan rapat koordinasi terbatas terkait tindak lanjut hasil kajian Dewan Ketahanan Nasional dan penyikapan isu-isu strategis nasional pada Kamis, 12 Oktober 2023 di Ruang Rapat Gedung III. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional beserta tim.



**Gambar 3.34 Rapat Koordinasi Terbatas Tindak Lanjut Hasil Kajian Dewan Ketahanan Nasional dan Penyikapan Isu-isu Strategis Nasional**

### ➤ **Pertemuan antara Wakil Sekretaris Kabinet dan Para Deputy dengan Wakil Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea Beserta Delegasi**

Wakil Sekretaris Kabinet bersama Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputy Bidang Perekonomian, serta Deputy Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan, melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea beserta delegasi pada tanggal 4 Desember 2023. Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas tindak lanjut kerja sama antara Sekretariat Kabinet dan Kementerian Legislasi Republik Korea (Moleg).



**Gambar 3.35 Wakil Sekretaris Kabinet Bersama Jajaran Pejabat Sekretariat Kabinet Menerima Wakil Menteri Legislasi Pemerintah Republik Korea**

### ➤ **Kunjungan INPUMA Universiti Malaya, Malaysia, dalam rangka Pelaksanaan Program “Leadership, Public Policy, and Nation Building: Lessons From Indonesia”**

Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Rabu, 27 September 2023 menerima kunjungan dari INPUMA (*International Institute of Public Policy and Management*) yang merupakan lembaga penelitian intensif dari di Universitas Malaya di Malaysia yang menawarkan program pascasarjana dalam kebijakan dan manajemen publik, serta program pendidikan eksekutif. Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh Prof. Dr. Khadijah Md Khalid selaku Direktur INPUMA dalam rangka pelaksanaan program “Leadership, Public Policy, and Nation Building: Lessons From Indonesia”.



**Gambar 3.36 Kunjungan INPUMA Universiti Malaya, Malaysia**

**➤ Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan**

Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan melaksanakan pengawasan langsung ke Kabupaten Kuningan pada Kamis, 25 Mei 2023 guna mengetahui pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2020 oleh instansi pemerintah pusat dan daerah (IPPD) khususnya dalam upaya penanggulangan kejadian karhutla di Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) yang mencapai 96,56 Ha pada 25 September 2022 lalu.



**Gambar 3.37 Pemantauan Kegiatan Pelaksanaan Inpres Nomor 3 Tahun 2020**

## B. ANALISIS PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis terhadap penggunaan sumber daya akan dijabarkan dalam 3 bagian yaitu analisis ketersediaan dan penggunaan anggaran, SDM dan sarana serta prasarana yang ketiganya merupakan faktor penting pelaksanaan kinerja.

### 1. Penggunaan Anggaran

Sebagaimana telah dijabarkan dalam Bab II. Perencanaan Kinerja terkait anggaran bahwasanya Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Tahun 2023 memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan, penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan, dan penyelenggaraan layanan fasilitasi operasional sebesar Rp4.600.000.000,00 (empat milyar enam ratus juta rupiah), namun seiring dengan adanya kebijakan peralihan anggaran pada bulan September 2023, jumlah anggaran menjadi Rp2.310.616.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah).

Sepanjang Tahun 2023, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terus melakukan upaya untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan dengan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien. Adapun realisasi penggunaan anggaran setelah peralihan adalah sebesar Rp2.309.906.616,00 (dua milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam ribu enam ratus enam belas rupiah) dengan penjabaran sebagai berikut:

#### **Program Teknis: Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden**

Program Teknis dilaksanakan melalui 2 Sasaran Kegiatan yaitu “Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan” dan “Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan”. Adapun pagu anggaran setelah peralihan adalah sebesar Rp2.294.418.000,00 (dua milyar dua ratus sembilan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan anggaran dan ketercapaian output program sebagai berikut:

**Tabel 3.7 Pagu Anggaran Program Teknis  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

KEGIATAN	PAGU REVISI	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT PROGRAM
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp1.467.792.000	Rp1.467.568.854	100%
Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Rp826.626.000	Rp826.310.762	100%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp2.294.418.000</b>	<b>Rp2.293.879.616</b>	<b>100%</b>

### Program Generik: Dukungan Manajemen

Program Generik dilaksanakan melalui Sasaran Kegiatan yaitu “Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha”. Adapun pagu anggaran setelah peralihan adalah sebesar Rp16.198.000,00 (enam belas juta seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan realisasi penggunaan anggaran dan ketercapaian output program sebagai berikut:

**Tabel 3.8 Pagu Anggaran Program Generik  
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

KEGIATAN	PAGU REVISI	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT PROGRAM
Penyelenggaraan Layanan Fasilitasi Operasional dan Layanan Tata Usaha	Rp16.198.000	Rp16.027.000	100%
<b>TOTAL</b>	<b>Rp16.198.000</b>	<b>Rp16.027.000</b>	<b>100%</b>

### Analisis Efisiensi Keuangan

Merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga bahwasanya salah satu variabel evaluasi kinerja anggaran adalah efisiensi penggunaan anggaran. Adapun cara menghitung efisiensi level satuan kerja/Eselon I adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{OP} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AA \text{ Program}_i \times COP_i) - RA \text{ Program}_i)}{\sum_{i=1}^n (AA \text{ Program}_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

$E_{OP}$  : efisiensi *Output* Program tingkat unit eselon I  
 AA Program<sub>i</sub> : alokasi anggaran program i  
 RA Program<sub>i</sub> : realisasi anggaran program i  
 COP<sub>i</sub> : capaian *Output* Program i  
 n : jumlah program pada suatu unit eselon I

**Gambar 3.38 Rumus Perhitungan Efisiensi Satuan Kerja Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021**

Jika hasil yang didapatkan termasuk pada *range* tertinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dan terendah adalah sebesar -20% (minus dua puluh persen) maka dapat dikatakan penggunaan anggarannya efisien.

**Tabel 3.9 Perhitungan Efisiensi Anggaran  
 Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023**

PROGRAM	CAPAIAN OUTPUT PROGRAM (COP)	ALOKASI ANGGARAN (AA)	REALISASI ANGGARAN (RA)	AA X COP	(AA X COP) - RA
1	100%	Rp2.294.418.000	Rp2.293.879.616	Rp2.294.418.000	Rp538.384
2	100%	Rp16.198.000	Rp16.027.000	Rp16.198.000	Rp171.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp2.310.616.000</b>	<b>Rp2.309.906.616</b>	<b>Rp2.310.616.000</b>	<b>Rp709.384</b>
				$(\sum ((AA \times COP) - RA) / \sum(AA)) * 100\%$	<b>0,0307% → 0,03%</b>

Berdasarkan rumus diatas yang diimplementasikan pada realisasi anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didapatkan nilai efisiensi sebesar **0,03%** yang artinya realisasi anggaran Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan masuk dalam **kategori efisien**.

## 2. Sumber Daya Manusia

Tahun 2022	VS	Tahun 2023
72	 JUMLAH PEGAWAI	70
Laki-Laki: 34 Perempuan: 38	 JENIS KELAMIN	Laki-Laki: 31 Perempuan: 39
Eselon I : 1 Eselon II : 4 Eselon III : 13 Eselon IV : 26 Analisis : 28	 JABATAN	Eselon I : 1 Eselon II : 4 Eselon III : 13 Eselon IV : 29 Analisis : 23
S1 : 1 S2 : 35 S3 : 35 D3 : 1	 PENDIDIKAN	S1 : 1 S2 : 33 S3 : 35 D3 : 1

**Gambar 3.39 Perbandingan SDM Kedeputian Bidang Polhukam Tahun 2022 dan 2023**

tersebut mempengaruhi faktor seperti jumlah sdm, jenis kelamin, jabatan, dan tingkat pendidikan. Namun secara general posisi jabatan Eselon IV sudah terisi penuh dan menjadi potensi untuk meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan terus berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan mendorong pegawai untuk memperoleh beasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri, serta mengikuti pelatihan/seminar/sejenisnya yang dapat meningkatkan kompetensi baik teknis (*hard skills*) maupun non-teknis (*soft skills*). Pada Tahun 2023 tercatat 1 (satu) orang pegawai menyelesaikan pendidikan S2, 1 (satu) orang dalam proses perkuliahan, 35 (tiga puluh lima) orang mengikuti pelatihan dan 53 (lima puluh tiga) orang mengikuti seminar/konferensi/sosialisasi.

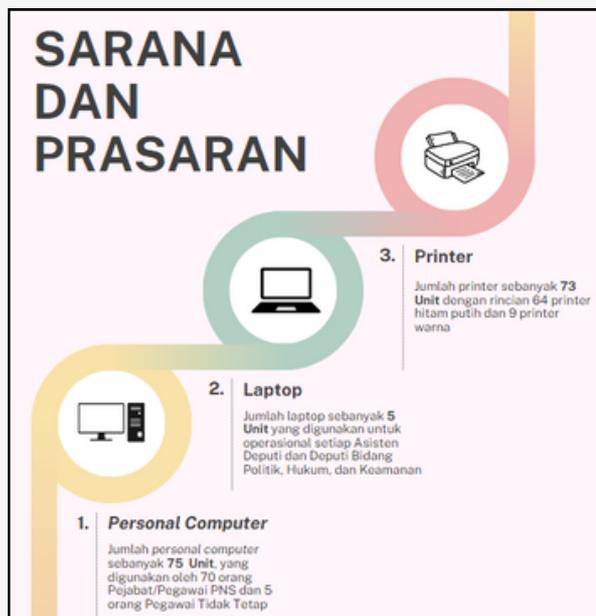
Selain itu, guna meningkatkan kemampuan analisis dan menyampaikan pendapat, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendorong pejabat/pegawainya untuk menyusun artikel yang ditayangkan dalam website setkab.go.id terkait dengan materi atau isu yang berkembang sesuai dengan bidang yang dikuasainya, hal ini juga sebagai upaya penyebaran informasi kepada masyarakat terhadap isu yang berkembang saat ini. Selama tahun 2023 tercatat sebanyak 24 artikel yang telah tayang.

Berdasarkan data sampai dengan bulan Desember 2023 Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebanyak 70 (tujuh puluh) orang ASN, jika dibandingkan dengan data tahun 2022 menurun sebanyak 2 orang, hal ini dikarenakan pada Bulan September terjadi promosi dan mutasi pejabat/pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet yang mengakibatkan terjadinya perubahan personel di Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Perubahan



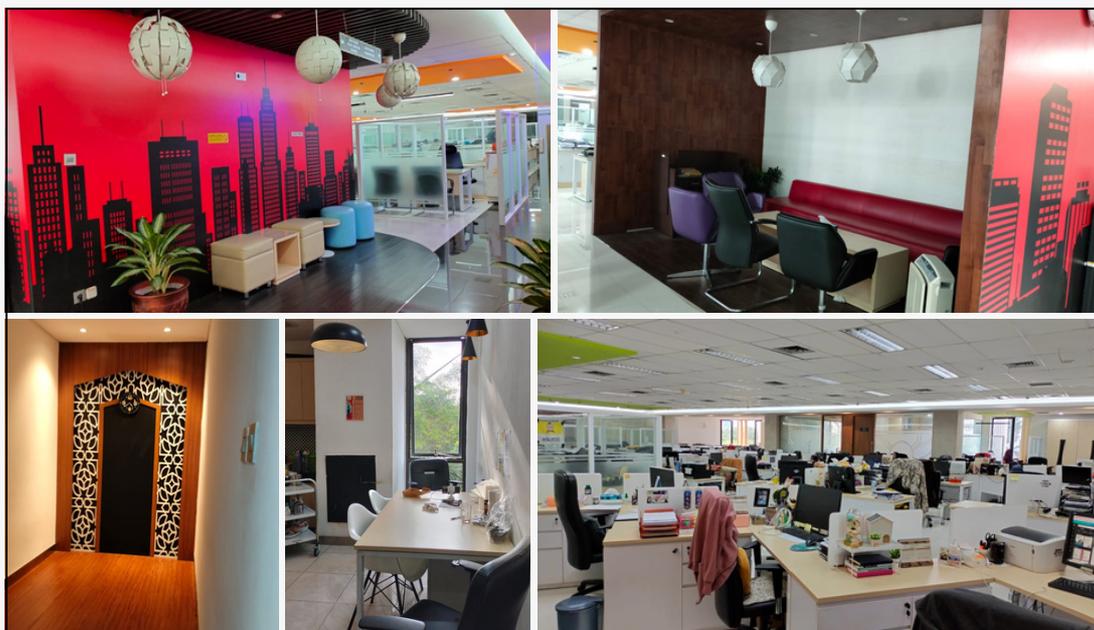
### 3. Sarana dan Prasarana

Kebutuhan sarana dan prasarana yang baik merupakan salah satu penunjang pekerjaan, hal tersebut dapat dianalisis berdasarkan data kuantitas aset di Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, khususnya jumlah komputer serta peralatan penunjangnya. Berdasarkan data jumlah aset per 31 Desember 2023 terdapat 75 Unit komputer, 5 unit laptop, dan 73 unit printer yang ada di lingkungan Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dimana secara umum dalam kondisi baik.



Gambar 3.40 Sarana dan Prasarana di lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam

Di samping itu, tata ruang kantor telah diatur dengan sebaik mungkin berdasarkan prinsip penataan *layout* yang efektif sesuai dengan kebutuhan pegawai yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer yang lebih terbuka guna meningkatkan kinerja pegawai.



Gambar 3.41 Tata Ruang Kantor di Lingkungan Kedeputan Bidang Polhukam

# BAB IV

# PENUTUPAN



# BAB IV. PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKj) Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2023 menerangkan pencapaian Deputy Bidang Polhukam terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen perjanjian kinerja tahun 2023. Secara keseluruhan capaian kinerja Deputy Bidang Polhukam masuk dalam kategori Memuaskan yakni sebesar 103,99%, dengan target yang ditetapkan di tahun 2023 sebesar 96%.

Secara lebih terinci perolehan sasaran pertama dan kedua terkait Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden berupa rekomendasi kebijakan sebesar 104.17% dengan jumlah *output* 272 rekomendasi yang seluruhnya telah dimanfaatkan dan ditindaklanjuti oleh Presiden dan Menteri/Kepala Lembaga dan sasaran ketiga sebesar 103,76% berupa dukungan manajemen terhadap pengelolaan program dan anggaran, akuntabilitas kinerja serta reformasi birokrasi di lingkungan Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dari sisi anggaran, Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan telah merealisasikan anggaran sebesar Rp2.309.906.616,00 (dua milyar tiga ratus sembilan juta sembilan ratus enam ribu enam ratus enam belas rupiah) atau 99,97% dari keseluruhan target anggaran setelah revisi APBN sebesar Rp2.310.616.000,00 (dua milyar tiga ratus sepuluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dan masuk dalam kategori efisien dengan nilai efisiensi yang didapatkan sebesar 0,03%.

Guna mempertahankan bahkan meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Politik, Hukum, dan Keamanan ditahun yang akan datang, ada beberapa langkah perbaikan kinerja yang dilaksanakan, diantaranya adalah:

- a. menyusun perencanaan kerja yang matang di awal tahun;
- b. terus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan mitra kerja Kementerian/Lembaga;
- c. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan para pejabat/pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Poltik, Hukum, dan Keamanan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum lainnya secara merata sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- d. memantau dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkelanjutan.

# LAMPIRAN





## Realisasi Anggaran Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

REALISASI ANGGARAN KEDEPUTIAN BIDANG POLHUKAM TA 2023							
No	Unit Kerja	RO	Pagu Anggaran	PAGU REVISI	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5-6)	(8)
<b>A</b>	<b>Kedeputian Polhukam</b>		<b>Rp 4.600.000.000</b>	<b>Rp 2.310.616.000</b>	<b>Rp 2.309.906.616</b>	<b>Rp 709.384</b>	<b>99,97%</b>
<b>1</b>	<b>Polhukam 1 (Asisten Deputy Bidang Pemerintahan Dalam Negeri)</b>		<b>Rp 1.100.000.000</b>	<b>Rp 483.679.000</b>	<b>Rp 483.500.579</b>	<b>Rp 178.421</b>	<b>99,96%</b>
		Rekomendasi kebijakan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri (6401.ABC.001)	Rp 553.696.000	Rp 181.911.000	Rp 181.910.475	Rp 525	99,9997%
		Hasil pengendalian pengelenggaraan pemerintahan di bidang Pemerintahan Dalam Negeri	Rp 546.304.000	Rp 301.768.000	Rp 301.590.104	Rp 177.896	99,94%
<b>2</b>	<b>Polhukam 2 (Asisten Deputy Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara)</b>		<b>Rp 1.000.000.000</b>	<b>Rp 455.711.000</b>	<b>Rp 455.373.768</b>	<b>Rp 337.232</b>	<b>99,93%</b>
		Rekomendasi kebijakan di bidang Hukum, HAM, dan Aparatur Negara (6401.ABD.001)	Rp 625.983.000	Rp 278.638.000	Rp 278.425.741	Rp 212.259	99,92%
		Hasil pengendalian pengelenggaraan pemerintahan di bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Aparatur Negara (6402.ABC.001)	Rp 374.017.000	Rp 177.073.000	Rp 176.948.027	Rp 124.973	99,93%
<b>3</b>	<b>Polhukam 3 (Asisten Deputy Bidang Hubungan Internasional)</b>		<b>Rp 1.000.000.000</b>	<b>Rp 552.102.000</b>	<b>Rp 552.099.480</b>	<b>Rp 2.520</b>	<b>99,9995%</b>
		Rekomendasi kebijakan di bidang Hubungan Internasional (6401.ABC.002)	Rp 711.580.000	Rp 442.273.000	Rp 442.270.480	Rp 2.520	99,999%
		Hasil pengendalian pengelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional (6402.ABC.002)	Rp 288.420.000	Rp 109.829.000	Rp 109.829.000	Rp -	100%
<b>4</b>	<b>Polhukam 4 (Asisten Deputy Bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika)</b>		<b>Rp 1.500.000.000</b>	<b>Rp 819.124.000</b>	<b>Rp 818.932.789</b>	<b>Rp 191.211</b>	<b>99,98%</b>
		Rekomendasi kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (6401.ABE.001)	Rp 835.830.000	Rp 564.970.000	Rp 564.962.158	Rp 7.842	99,999%
		Hasil pengendalian pengelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika (6402.ABE.001)	Rp 464.170.000	Rp 237.956.000	Rp 237.943.631	Rp 12.369	99,99%
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Rp 45.485.000	Rp 6.500.000	Rp 6.417.000	Rp 83.000	98,72%
		Layanan Umum	Rp 116.820.000	Rp 8.950.000	Rp 8.950.000	Rp -	100%
		Dokumen akuntabilitas	Rp 37.695.000	Rp 748.000	Rp 660.000	Rp 88.000	88,24%

## Capaian Rencana Kinerja Deputy Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARAT KABINET																	
2. PROGRAM : CA : Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden																	
3. SASARAN PROGRAM : I : Tercapainya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemitiraman dan Investasi																	
: II : Tercapainya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemitiraman dan Investasi																	
KODE	SASARAN PROGRAM   INDIKATOR SASARAN PROGRAM (ISP)	TAHUN 2023 VOLUME/ TARGET	SATUAN	RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN 2023	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	Tercapainya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemitiraman dan Investasi																
01.01	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang dimanfaatkan	96	Persentase													96	96
<b>CAPAIAN IOP YANG DIMANFAATKAN</b>				11	12	13	11	18	13	6	17	13	14	7	15	147	
<b>CAPAIAN IOP YANG DISAMPAIKAN</b>				11	12	13	11	18	13	6	18	12	14	8	14	147	
<b>CAPAIAN ISP 1 (ISP_1)</b>				100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	108%	100%	88%	107%	100,00%	104,17%	
01.02	Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti	96	Persentase													96	96
<b>CAPAIAN IOP YANG DITINDAKLANJUTI</b>				11	10	5	6	5	7	7	7	9	7	4	14	92	
<b>CAPAIAN IOP YANG DISAMPAIKAN</b>				11	11	4	7	4	7	8	7	8	7	4	14	92	
<b>CAPAIAN ISP 2 (ISP_2)</b>				100%	91%	125%	86%	125%	100%	88%	100%	113%	100%	100%	100,00%	104,17%	
03	Tercapainya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemitiraman dan Investasi																
03.01	Persentase rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti	96	Persentase													96	96
<b>CAPAIAN IOP YANG DITINDAKLANJUTI</b>				-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	5	10	
<b>CAPAIAN IOP YANG DISAMPAIKAN</b>				-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	5	10	
<b>CAPAIAN ISP 3 (ISP_3)</b>				0%	0%	100%	0%	0%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	100,00%	104,17%	
03.02	Persentase rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang ditindaklanjuti	96	Persentase													96	96
<b>CAPAIAN IOP YANG DITINDAKLANJUTI</b>				2	-	-	3	3	2	1	1	2	1	1	7	23	
<b>CAPAIAN IOP YANG DISAMPAIKAN</b>				2	-	-	3	3	2	1	2	1	2	-	7	23	
<b>CAPAIAN ISP 2 (ISP_4)</b>				100%	0%	0%	100%	100%	100%	50%	200%	50%	0%	100%	100,00%	104,17%	

7. RINCIAN PROGRAM																	
KODE	SASARAN PROGRAM   OUTPUT PROGRAM   INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	TAHUN 2023 VOLUME/ TARGET	SATUAN	RENCANA REALISASI BULAN KE-												TAHUN 2023	%
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
01	Tercapainya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemitiraman dan Investasi																
01.01	Rekomendasi kebijakan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemitiraman dan Investasi	39	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	16	1	1	-	2	-	19	39	100,00%
<b>CAPAIAN OUTPUT PROGRAM 1</b>				-	-	-	-	-	16	1	1	-	2	-	19	39	100,00%
01.01.01	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	31	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	10	-	4	-	-	-	17	31	100,00%
<b>CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 (IOP_1)</b>				-	-	-	-	-	12	1	1	-	2	-	15	31	100,00%
01.01.02	Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	8	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	8	100,00%
<b>CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 2 (IOP_2)</b>				-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	8	100,00%
03	Tercapainya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemitiraman dan Investasi																
03.03	Hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Perekonomian, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Kemitiraman dan Investasi	31	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	8	1	-	-	1	3	18	31	100,00%
<b>CAPAIAN OUTPUT PROGRAM 3</b>				-	-	1	-	1	8	-	1	-	1	1	18	31	100,00%
03.03.01	Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	16	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	2	9	16	100,00%
<b>CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 1 (IOP_3)</b>				-	-	1	-	-	4	-	-	-	1	1	9	16	100,00%
03.03.02	Jumlah rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang disampaikan kepada Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	15	Rekomendasi Kebijakan	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	1	9	15	100,00%
<b>CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM 2 (IOP_4)</b>				-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	9	15	100,00%

## Peserta Pelatihan di Kedeputan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

NO	NIP	NAMA	NAMA PELATIHAN
1	'198011272006042004	Novilia Mayasari, S.IP., M.A.	Legislative Drafting Training Intermediate Level
2	'199204032018011001	Rahmat Dany Bastan, S.T.	Legislative Drafting Training Intermediate Level
3	'199003062014021001	A Bayu Wiraditya Pawi, S.H.Int., MPA.	- Pelatihan Keterampilan Menulis Efektif di Lingkungan Pemerintahan - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Terkait Dengan Hasil Kekuatan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 pada 5 s.d. 9 September 2023
4	'199504072018011002	Adam Mulya Bunga Mayang, S.H., M.H.	Pelatihan Keterampilan Menulis Efektif di Lingkungan Pemerintahan
5	'198604082014021001	Alwin Juang Hamonangan, S.H., M.H.	Pelatihan Keterampilan Menulis Efektif di Lingkungan Pemerintahan
6	'198803272014022002	Benedicta Trixie Ariestianti, S.IP., M.Si (han).	Pelatihan Keterampilan Menulis Efektif di Lingkungan Pemerintahan
7	'198404172008012002	Cassie Johanna, S.H., M.H.	Legislative Drafting Training Intermediate Level
8	'198909162012122001	Cesty Nur Tribuana, S.IP., M.A.	- Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal terkait Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika pada tanggal 3-5 Juli 2023 - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Terkait Praktik Kebijakan dan Regulasi Terkait Penyusunan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional di Amerika Serikat dan Belanda pada tanggal 5-12 Juni 2023
9	'198906172018011001	Danang Rahmat, S.E.	Pelatihan ISO 27001 - 2022 ISMS Foundation
10	'196902271995031001	Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.	- Pelatihan Smart Coaching and Mentoring - Belajar Mandiri - Mengikuti Havard Kennedy School Webinar Series mengenai The Science Behind Generative AI - Belajar Mandiri - Mengikuti Havard Kennedy School Webinar Series mengenai A Darkening Horizon - Nuclear Dangers Around the World
11	'197608041998032001	Dwirani Pharamasti Muktisari, S.H.	- Legislative Drafting Training Intermediate Level - Capacity Building for Legislative System Improvement in Indonesia
12	'196807011994031001	Edwin Jeffry Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.	Pelatihan Smart Coaching and Mentoring
13	'198610012009012004	Emmi Elisabeth P Panggabean, S.E., M.Ec.	Capacity Building for Legislative System Improvement in Indonesia
14	'198603202008011002	Erick Mario, S.H., M.H.	Pelatihan Smart Coaching and Mentoring
15	'199401112020121007	Faiz Balya Marwan, S.IP.	Pelatihan English For Business

NO	NIP	NAMA	NAMA PELATIHAN
16	'197606042005012010	Fauziana Nurul Aini, S.IP., M.A.	- Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal terkait Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika pada tanggal 3-5 Juli 2023 - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Terkait Praktik Kebijakan dan Regulasi Terkait Penyusunan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional di Amerika Serikat dan Belanda pada tanggal 5-12 Juni 2023
17	'198202102008011010	Hermawan Susanto, S.H., M.A.	Soul of Speaking Bukan Sekedar Bicara for Prime II
18	'199409192018012001	Indri Sukmawati Djangko, S.H.	Belajar Mandiri - Membaca dan Menelaah UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU Nomor 15 Tahun 2019 dan Nomor 13 Tahun 2022
19	'198509142008012002	Indrita Hardiana, S.H., MALP.	Capacity Building for Legislative System Improvement in Indonesia
20	'199104222015022001	Kartika Puspitasari, S.H.	Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal terkait Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN
21	'199006022014022001	Lusia Novita Sari, S.Sos., M.S.G.A.	- Women in Foreign Policy Fellowship - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal terkait Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika pada tanggal 1-5 Agustus 2023 - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal terkait Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika pada tanggal 3-5 Juli 2023 - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Terkait Praktik Kebijakan dan Regulasi Terkait Penyusunan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional di Amerika Serikat dan Belanda pada tanggal 5-12 Juni 2023 - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Kebijakan Luar Negeri Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia, serta terkait Organisasi MIKTA pada tanggal 14-18 Februari 2023 - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal terkait Penerapan Golden Visa di Berbagai Negara dan Membaca Peraturan Perundang-Undangan Terkait Kelmigrasian di Indonesia pa tanggal 28 Maret - 1 April 2023
22	'197801312005012017	Mikasari Muthmainah Jatningsih, S.AP., MAP.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
23	'197909072008011007	Muhamad Erwin Mulyana, S.IP., M.Pub.Pol.	Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Terkait Dengan ASEAN Indo Pacific Forum 2023 pada 5 s.d. 9 September 2023

NO	NIP	NAMA	NAMA PELATIHAN
24	'199208252020121007	Muhammad Iqbal, S.Sos.	- Pelatihan English For Business - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Terkait Dengan Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN pada 5 s.d. 9 September 2023 - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Terkait Dengan ASEAN Indo Pacific Forum 2023 pada 5 s.d. 9 September 2023
25	'199302092018012001	Nabila Amalia, S.H.	Legislative Drafting Training Intermediate Level
26	'198011272006042004	Novilia Mayasari, S.IP., M.A.	Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Terkait Hasil Keketuaan Indonesia di ASEAN Tahun 2023 pada 5 s.d. 9 September 2023
27	'198010112008011009	Oto Hidayat, S.H., M.L.S.	- Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal terkait Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika pada tanggal 3-5 Juli 2023 - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Terkait Praktik Kebijakan dan Regulasi Terkait Penyusunan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional di Amerika Serikat dan Belanda pada tanggal 5-12 Juni 2023
28	'199210132019022001	Penita Prasasya, S.H.	- Capacity Building for Legislative System Improvement in Indonesia - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal terkait Kebijakan Luar Negeri Indonesia di Kawasan Afrika pada tanggal 3-5 Juli 2023 - Belajar Mandiri - Membaca Artikel dan Jurnal Terkait Praktik Kebijakan dan Regulasi terkait Penyusunan dan Ratifikasi Perjanjian International di Amerika Serikat dan Belanda pada tanggal 5-12 Juni 2023
29	'198511112009022001	Rika Yuristia Mardhiyah, S.H., M.H.	Legislative Drafting Training Intermediate Level
30	'199605072020122017	Riska Nurhayati, S.HI.	Pelatihan Keterampilan Menulis Efektif di Lingkungan Pemerintahan
31	'198505152010122001	Riski Dwijayanti, S.E., MGPP	Singapore Cooperation Programme Course on Law of The Sea and Climate Change
32	'198801242010122003	Tania Cahya Utami Dewi, S.H.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
33	'198606262009021001	Taufik Akbar, S.IP., M.A.	Capacity Building for Legislative System Improvement in Indonesia
34	'199602292019021001	Yehuda Bimo Yudanto Purwanto Putro, S.H.	- Legislative Drafting Training Intermediate Level - Capacity Building for Legislative System Improvement in Indonesia
35	'198908272015022001	Zahrotul Addawiyah Iskandar, S.Sos., M.A.	Pelatihan Keterampilan Menulis Efektif di Lingkungan Pemerintahan

## Peserta Seminar/Konferensi/Sosialisasi Kedeputusan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

	NIP	NAMA	SEMINAR/KONFERENSI/SOSIALISASI
1	'198509142008012002	Indrita Hardiana, S.H., MALP.	Arms Modernisation and Defence Industry One Year After Russian Military Aggression Against Ukraine and Its Impact on Indonesia's Defence Setahun Perang Rusia-Ukraina Pembelajaran bagi Strategi Pertahanan Darat Indonesia Ukraine on Fire - One Year of Resistance Legislasi Cipta Kerja - Menggagas Solusi Permasalahan Hukum dan Potensi Dampak Pelaksanaan Undang-Undang Minority to Majority Dialogue - Assisting a Receiver for the Minority's Messages Setahun Perang Rusia-Ukraina Pembelajaran bagi Operasi Udara dan Laut TNI Transfer of Technology - A Strategic Partnership in Defence Investment A Town Hall on Climate Diplomacy with Prime Minister Kim Campbell AUKUS Nuclear Submarine Pact - A Reminder of Indonesia's Vulnerable Underwater Defence Unlocking the Potential - Penetrating the Global Defence Supply Chain Kerja Sama Penanggulangan Narkotika di Perbatasan
2	'198202102008011010	Hermawan Susanto, S.H., M.A.	Bedah Buku Prof Dr Jimly Asshiddiqie Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Jepang (Berkontribusi pada Bagaimana Menghindari Konflik antara Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Peraturan Daerah Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
3	199409132018021001	Aryo Akmal Fauzias, S.IP.	Sosialisasi Peraturan atau Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023 (II)
4	'198901262014022003	Ririn Yanuar Megawati, S.IP.	Sosialisasi Peraturan atau Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023 (II) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Jepang (Berkontribusi pada Bagaimana Menghindari Konflik antara Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Peraturan Daerah Diseminasi Kajian Pelindungan Hak atas Pekerjaan dan Pekerjaan Layak bagi Kelompok Marginal di Indonesia dalam Membangun Resiliensi Menghadapi Krisis di Masa Depan
5	'198505152010122001	Riski Dwijayanti, S.E., MGPP	Sosialisasi Peraturan atau Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023 (II) Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru ASEAN sebagai Epicentrum of Growth - Menuju ASEAN yang Inklusif dan Terintegrasi di bawah Ketekuaan Indonesia Understanding the Complexity of the Climate Change Challenge
6	'197801312005012017	Mikasari Muthmainah Jatningsih, S.AP., MAP.	Sosialisasi Peraturan atau Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023 (II) Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet
7	'198906172018011001	Danang Rahmat, S.E.	Sosialisasi Peraturan atau Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023 (II) Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
8	'198404172008012002	Cassie Johanna, S.H., M.H.	Sosialisasi Peraturan atau Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023 (II) Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Jepang (Berkontribusi pada Bagaimana Menghindari Konflik antara Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Peraturan Daerah
9	'198606192020122005	Ascana Luisa Gurusinga, S.I.P.	Sosialisasi Peraturan atau Ketentuan tentang Tata Cara Revisi Anggaran dan Bimbingan Teknis Tata Cara Revisi Anggaran TA 2023 (II) Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru Penyusunan Policy Brief yang Efektif

	NIP	NAMA	SEMINAR/KONFERENSI/SOSIALISASI
			Teknik Pengumpulan Data Kinerja dalam Penyusunan Laporan Kinerja
			Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan
			Strategi Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
			Optimalisasi Pengawasan Kearsipan dalam Perwujudan Budaya Tertip Arsip
			Strategi Percepatan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pemerintahan KLD
			Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet
			Konseptual Pelayanan Publik Berdasarkan PermenPAN-RB No 29 Tahun 2022 dan Pedoman MenPAN-RB No 1 Tahun 2022
			Penguatan Peran Agent of Change dalam Mendorong Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
			Integrasi Sistem Kerja dan Peta Proses Bisnis
			Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan Komponen Perencanaan
			Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
			Penyelenggaraan Kearsipan Sebagai Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi
			Strategi Penguatan Manajemen Risiko dalam Proses Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
			Strategi dan Metode Audit Kinerja untuk Mendukung Peningkatan Kualitas SAKIP
			Kiat-Kiat Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
			Pemenuhan Minimum Requirements Serta Pengumpulan Bukti Dukung dalam Evaluasi AKIP Tahun 2023
10	'197110181995111001	Avip Suchron Nur Hakim, S.Sos., M.H.	Agenda Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 - Peluang dan Tantangan
11	'197909072008011007	Muhamad Erwin Mulyana, S.IP., M.Pub.Pol.	Agenda Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 - Peluang dan Tantangan
12	'198902012018011001	Yazid, S.I.P.	Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet
			Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
13	'199208252020121007	Muhammad Iqbal, S.Sos.	Agenda Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 - Peluang dan Tantangan
			Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet
			Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
			Penyusunan Policy Brief yang Efektif
14	'199003062014021001	A Bayu Wiraditya Pawi, S.H.Int., MPA.	Agenda Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023 - Peluang dan Tantangan
15	'199606092019021001	Ghafardan Fikrana, S.H.	One Year After Russian Military Aggression Against Ukraine and Its Impact on Indonesias Defence
			Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
			Pembangunan Ekonomi dengan Karater Wilayah Kepulauan Beyond MOU - Opportunities for National Industry within Defence Cooperation
			AUKUS Nuclear Submarine Pact - A Reminder of Indonesias Vulnerable Underwater Defence
16	'198909162012122001	Cesty Nur Tribuana, S.IP., M.A.	Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet
			Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
			Knowledge Sharing Tentang Carbon Accounting
			Peran Strategis Surat Presiden dalam Penguatan Hubungan Diplomatik di Era Digital
			ASEAN sebagai Epicentrum of Growth - Menuju ASEAN yang Inklusif dan Terintegrasi di bawah Keketuaan Indonesia
			This Is Our World Too
			Roundtable Discussion on Indonesia-Japan Bilateral Relations - Celebrating 65 years of Friendship and Cooperation, Moving Foward Together
			A Town Hall on Climate Diplomacy with Prime Minister Kim Campbell
17	'197606042005012010	Fauziana Nurul Aini, S.IP., M.A.	Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet
			Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
			Knowledge Sharing Tentang Carbon Accounting
			Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Institusi : Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan, Pelaporan, dan Implementasi Keputusan Persidangan Kabinet (Sesi 1)
			Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Institusi : Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan, Pelaporan, dan Implementasi Keputusan Persidangan Kabinet (Sesi 2)
			E-Learning Program Bahasa Korea, Beginner Korean Class - Intermediate A
			Roundtable Discussion on Indonesia-Japan Bilateral Relations - Celebrating 65 years of Friendship and Cooperation, Moving Foward Together
			Reinvigorating Commitment for Democratic Resilience and Good Governance

NIP	NAMA	SEMINAR/KONFERENSI/SOSIALISASI
18	'199006022014022001 Lusia Novita Sari, S.Sos., M.S.G.A.	Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru Knowledge Sharing Tentang Carbon Accounting Peran Strategis Surat Presiden dalam Penguatan Hubungan Diplomatik di Era Digital Think Policy Bootcamp 7 A Global Biodiversity Framework for Disaster and Climate Resilience Building Regional Architecture with Dr Tsutomu Kikuchi Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia Nudge Theory and Its Implementations on Regional Economic Roundtable Discussion on Indonesia-Japan Bilateral Relations - Celebrating 65 years of Friendship and Cooperation, Moving Forward Together Communication Science Summer Course 2023 Saving Our Earth - Environmental Challenges and Solutions in Southeast Asia Countries Leadership Studies with Dr Dino Patti Djalal International Business with Jamshyd Godrej IRUD International Relations University Diponegoro Summer Course 2023 Centering Indonesia - Perspectives and Contemporary Issues
19	'198503082009122001 Lusianna Elizabeth, S.H., M.H.	Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
20	'198010112008011009 Oto Hidayat, S.H., M.L.S.	Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru Roundtable Discussion on Indonesia-Japan Bilateral Relations - Celebrating 65 years of Friendship and Cooperation, Moving Forward Together
21	199204032018011001 Rahmat Dany Bastan, S.T.	Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet Manajemen Risiko SPBE pada Program Government Transformation Academy Preparation in Handling The Cyber Crisis Pelatihan Cybersecurity Essentials pada Program Government Transformation Academy
22	'199212232018012002 Rika Handayani, S.T.	Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru Persiapan Menuju Evaluasi Reformasi Birokrasi Langkah Persiapan Evaluasi Zona Integritas Instansi Pemerintah Tahun 2023
23	'196704011994031018 Drs. R. Theodor Djoko Rahwidiharto, M.Si.	Sosialisasi Pemutakhiran Data Profil Perpajakan Bagi Seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Kabinet Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
24	'198310312008012003 Retno Wulandari, S.H., M.H.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Jepang (Berfokus pada Bagaimana Menghindari Konflik antara Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Peraturan Daerah Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
25	'199302092018012001 Nabila Amalia, S.H.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Jepang (Berfokus pada Bagaimana Menghindari Konflik antara Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Peraturan Daerah
26	'199504072018011002 Adam Mulya Bunga Mayang, S.H., M.H.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Jepang (Berfokus pada Bagaimana Menghindari Konflik antara Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Peraturan Daerah Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia Penataan Legislasi di Indonesia Legal Drafting Regulasi Energi dan Pertambangan Kampanye di Kampus - Langkah Tepat Edukasi Politik Pemilih Muda Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Institusi : Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan, Pelaporan, dan Implementasi Keputusan Persidangan Kabinet (Sesi 1) Kesiapan Penyelenggaraan dan Manajemen Risiko pada Pemilu 2024 Percepatan Realisasi APBD untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Strategi dan Sinergitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi
27	'197511122002122001 Novi Pratiwi Dewi, S.H., M.H.	Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru Mewujudkan Profesionalitas ASN Melalui Sistem Merit Kunci Keberhasilan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
28	'199205122020121012 Gedzha Aldino Putra Mahayadnya Gede, S.IP.	Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
29	'199107152014022001 Nurul Hani Pratiwi, S.H.	Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Jepang (Berfokus pada Bagaimana Menghindari Konflik antara Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Peraturan Daerah Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia

	NIP	NAMA	SEMINAR/KONFERENSI/SOSIALISASI
30	'198603202008011002	Erick Mario, S.H., M.H.	Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Institusi : Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan, Pelaporan, dan Implementasi Keputusan Persidangan Kabinet (Sesi 1) Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Institusi : Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan, Pelaporan, dan Implementasi Keputusan Persidangan Kabinet (Sesi 2)
31	'197905072006042002	Dinar Kristina, S.IP., M.I.S.	Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
32	'199612202020122016	RR. Intan Ratih Perwitasari, S.H.	Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru Pemanfaatan MPP Digital untuk Pemutakhiran Data dalam Pemberdayaan Masyarakat Membangun Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Laut Indonesia Unlocking the Potential - Penetrating the Global Defence Supply Chain Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Narkoba Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
33	'196902271995031001	Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.	Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Institusi : Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan, Pelaporan, dan Implementasi Keputusan Persidangan Kabinet (Sesi 1) Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Institusi : Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan, Pelaporan, dan Implementasi Keputusan Persidangan Kabinet (Sesi 2) Fundamental Administrasi Pajak - Perdagangan Karbon dan Pajak Karbon Gaming Simulation Development Planning
34	'199204202014022002	Apria Ivoni Suci, S.H.	Sosialisasi Pemindahan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Kabinet ke Ibu Kota Negara Baru
35	'198909302015022001	Wening Hapsari Marifatullah, S.IP., MA.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Jepang (Berkfokus pada Bagaimana Menghindari Konflik antara Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Peraturan Daerah Diseminasi Kajian Pelindungan Hak atas Pekerjaan dan Pekerjaan Layak bagi Kelompok Marginal di Indonesia dalam Membangun Resiliensi Menghadapi Krisis di Masa Depan Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia
36	'197904112006042004	Irawati, S.IP., M.H.	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Jepang (Berkfokus pada Bagaimana Menghindari Konflik antara Peraturan Perundang-undangan Pusat dan Peraturan Daerah Diseminasi Kajian Pelindungan Hak atas Pekerjaan dan Pekerjaan Layak bagi Kelompok Marginal di Indonesia dalam Membangun Resiliensi Menghadapi Krisis di Masa Depan Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia
37	'199309192019021001	Ary Maulana, S.IP.	Diseminasi Kajian Pelindungan Hak atas Pekerjaan dan Pekerjaan Layak bagi Kelompok Marginal di Indonesia dalam Membangun Resiliensi Menghadapi Krisis di Masa Depan
38	'199401112020121007	Faiz Balya Marwan, S.IP.	Setahun Perang Rusia-Ukraina Pembelajaran bagi Operasi Udara dan Laut TNI Membangun Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Laut Indonesia Cerdas dan Bijak Menggunakan Produk dan Jasa Keuangan Peran Organisasi Kemasyarakatan Perempuan Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Mendukung Suksesnya Pemilu 2024 Legislasi Cipta Kerja - Menggagas Solusi Permasalahan Hukum dan Potensi Dampak Pelaksanaan Undang-Undang Setahun Perang Rusia-Ukraina Pembelajaran bagi Strategi Pertahanan Darat Indonesia Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Narkoba Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 Analisis Strategi Kebijakan Tentang Pengadilan HAM di Indonesia Pemanfaatan MPP Digital untuk Pemutakhiran Data dalam Pemberdayaan Masyarakat Kerja Sama Penanggulangan Narkotika di Perbatasan Diplomasi di Tengah Situasi yang Menantang

NIP	NAMA	SEMINAR/KONFERENSI/SOSIALISASI
39	'198006142008011013	<p data-bbox="799 264 1197 324">Farid Budi Prabowo, S.IP., M.NSP.</p> <p data-bbox="799 324 1197 353">Cek Dahulu Jangan Mudah Percaya - Awas Berita Palsu</p> <p data-bbox="799 353 1197 383">The QUAD and What It Means for ASEAN</p> <p data-bbox="799 383 1197 412">Diplomasi di Tengah Situasi yang Menantang</p> <p data-bbox="799 412 1197 441">Digital Transformation in Indonesia - Whats Next</p> <p data-bbox="799 441 1197 470">Objektif Menilai Pengaruh Influencer</p> <p data-bbox="799 470 1197 499">Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Narkoba Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024</p> <p data-bbox="799 499 1197 528">Membangun dan Memastikan Partisipasi Bermakna Dalam Proses Legislasi</p> <p data-bbox="799 528 1197 557">Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia</p> <p data-bbox="799 557 1197 586">Kerja Sama Penanggulangan Narkotika di Perbatasan</p> <p data-bbox="799 586 1197 616">Refleksi 60 Tahun Integrasi Papua - Menemukan Jalan Damai dari Akar Rumpun</p> <p data-bbox="799 616 1197 645">Pembangunan Ekonomi dengan Karakter Wilayah Kepulauan</p> <p data-bbox="799 645 1197 674">Analisis Strategi Kebijakan Tentang Pengadilan HAM di Indonesia</p> <p data-bbox="799 674 1197 703">Mewaspadai Bahaya Politik Identitas Bagi Kalangan Milenial</p> <p data-bbox="799 703 1197 732">Unlocking the Potential - Penetrating the Global Defence Supply Chain</p> <p data-bbox="799 732 1197 761">Budaya Malu - Etika Moral Demokrasi</p> <p data-bbox="799 761 1197 790">Peran Lembaga Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Didik Guna Menghadapi Tantangan Perang Masa Depan (Generasi ke-6)</p> <p data-bbox="799 790 1197 819">Peran Lembaga Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Didik Guna Menghadapi Tantangan Perang Masa Depan - Generasi ke-6</p> <p data-bbox="799 819 1197 848">Kebijakan P4GN Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Untuk Menjaga Ketahanan Nasional</p> <p data-bbox="799 848 1197 878">Pengembangan Negara Kepulauan Berwawasan Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045</p> <p data-bbox="799 878 1197 907">Laying the Bricks for Just and Equitable Solutions to Climate Crisis</p> <p data-bbox="799 907 1197 936">Politics of Regional Architecture for Peace, Prosperity and Freedom in the Digital Era with Dr. Nobuhiro Aizawa</p> <p data-bbox="799 936 1197 965">Bimbingan Teknis Kearsipan untuk Arsiparis Hasil Penyetaraan</p> <p data-bbox="799 965 1197 994">Strengthening Defence, Safeguarding Nature - TNIS Energy Transition Plan</p> <p data-bbox="799 994 1197 1023">Menimbang Ulang Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Dalam Perspektif Pancasila</p> <p data-bbox="799 1023 1197 1052">Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan serta Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p data-bbox="799 1052 1197 1081">Membebaskan Demokrasi Indonesia Dari Cengkraman Oligarki - Mungkinkah</p> <p data-bbox="799 1081 1197 1111">Satu Tanah Air Indonesia - Pembangunan Wilayah Kepulauan Terdepan</p> <p data-bbox="799 1111 1197 1140">Kualitas Diet pada Berbagai Kelompok Populasi di Indonesia</p> <p data-bbox="799 1140 1197 1169">Pemanfaatan Media untuk Mencegah KEK, Daging sebagai Sumber Zat Gizi, dan Hubungan Makan Malam dengan Obesitas</p> <p data-bbox="799 1169 1197 1198">Islamic Civilization Historical Archives and International Diplomacy in Conjunction with Preliminary Meeting National Archives Cooperation Forum of Moslem Majority Countries</p> <p data-bbox="799 1198 1197 1227">Peran penting Pranata Humas mengawal orkestrasi gelaran KTT ASEAN 2023</p> <p data-bbox="799 1227 1197 1256">Disruptive Innovation in Dynamic Digital Era</p> <p data-bbox="799 1256 1197 1285">This is Our World Too-A North-South-East-West Dialogue of Civil Societies</p> <p data-bbox="799 1285 1197 1314">Protecting Indonesia's Underwater Sovereignty and Security</p> <p data-bbox="799 1314 1197 1344">Risiko Penyakit Tidak Menular Pada Pekerja</p> <p data-bbox="799 1344 1197 1373">Pencegahan stunting dengan strategi komunikasi kultural dan pemberian Kudapan Sehat Serta Pentingnya Fenomena Kolesterol LDL bagi kesehatan</p> <p data-bbox="799 1373 1197 1402">Keluarga Cerdas dan Bahagia Untuk Indonesia Maju</p> <p data-bbox="799 1402 1197 1431">Refleksi 78 Tahun Kemerdekaan Indonesia, dan Penangkal Radikalisme di Indonesia</p> <p data-bbox="799 1431 1197 1460">Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Institusi : Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan, Pelaporan, dan Implementasi Keputusan Persidangan Kabinet (Sesi 1)</p> <p data-bbox="799 1460 1197 1489">Outward-Looking Strategy Key to Post-MEF Naval Posture</p> <p data-bbox="799 1489 1197 1518">Reinvigorating Commitment for Democratic Resilience and Good Governance</p> <p data-bbox="799 1518 1197 1547">Sketsa Masa Depan Pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia Pasca-Pemilu 2024</p> <p data-bbox="799 1547 1197 1576">Sketsa Masa Depan Hukum, Ekonomi dan Politik Indonesia Pasca Pemilu 2024</p> <p data-bbox="799 1576 1197 1606">Seminar Hybrid memperingati Hari Meteorologi, Klimatologi, Geofisika ke 76</p> <p data-bbox="799 1606 1197 1635">Indonesia Merdeka Dari Korupsi</p> <p data-bbox="799 1635 1197 1664">Virtual Diskusi Publik Indonesia Merdeka Dari Korupsi - Arsip Korupsi Era Republik</p> <p data-bbox="799 1664 1197 1693">Perluakah Indonesia Memiliki Scientist Ketika Tempat Kerja Belum Terbangun</p> <p data-bbox="799 1693 1197 1722">Politik, Persona Media, dan Persepsi Anak Muda</p> <p data-bbox="799 1722 1197 1751">Intervensi Presiden pada Pilpres 2024 - Perspektif Hukum Tata Negara dan Politik</p> <p data-bbox="799 1751 1197 1780">Urgensi Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi</p> <p data-bbox="799 1780 1197 1809">Pemanfaatan MPP Digital untuk Pemutakhiran Data dalam Pemberdayaan Masyarakat</p> <p data-bbox="799 1809 1197 1839">Lokakarya Menavigasi Praktik Terbaik Kepatuhan Perdagangan dan Uji Tuntas</p>

NIP	NAMA	SEMINAR/KONFERENSI/SOSIALISASI
		Cara Cerdas Hindari Plagiarisme Dalam Publikasi
		Menuju 20 Tahun MK - Antara Judicialization of Politics dan Politicization of the Judiciary
		Inovasi dalam Melindungi Pekerja Ekonomi Gig
		The Rise of the AI
		Dinamika Pilpres 2024 - Peta Saat Ini
		Developing Smart City in the New Capital of Indonesia - Sharing Knowledge and Experiences from Australian Perspective
		Trends in Hospitality and Tourism Technology
		Cerdas dan Bijak Menggunakan Produk dan Jasa Keuangan
		Bagaimana Membedakan Diare dan Muntah Karena Alergi atau Virus
		Transfer of Technology - A Strategic Partnership in Defence Investment
		Prospek dan Tantangan Energy Transition Mechanism (ETM)
		Membangun Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Laut Indonesia
		Reshaping The Future of Digital Enterprise - Human, Innovation and Technology Integration
		Building Regional Architecture with Dr Tsutomu Kikuchi
		Proyeksi Tantangan Komoditas Strategis Minyak Bumi dan Batu Bara di Indonesia
		How to Improve Your Journal Article Acceptance Rate and Research Productivity
		One Year After Russian Military Aggression Against Ukraine and Its Impact on Indonesia's Defence
		Setahun Perang Rusia-Ukraina Pembelajaran bagi Strategi Pertahanan Darat Indonesia
		Storytelling in Business Advertising 101
		Legislasi Cipta Kerja - Menggagas Solusi Permasalahan Hukum dan Potensi Dampak Pelaksanaan Undang-Undang
		Diplomasi Ekonomi Pasar Non-Tradisional di Kawasan Amerika Latin
		Setahun Perang Rusia-Ukraina Pembelajaran bagi Operasi Udara dan Laut TNI
		Dont Limit Your Challenges, Challenge Your Limit
		Peran Organisasi Kemasyarakatan Perempuan Dalam Rangka Peningkatan Partisipasi Politik Dalam Mendukung Suksesnya Pemilu 2024
		Letusan Gunung Kelud dan Peradaban di Sekitarnya
		AUKUS Nuclear Submarine Pact - A Reminder of Indonesia's Vulnerable Underwater Defence
		Stop Bigotri Mari Promosi Toleransi
		Pupuk Indonesia Clean Ammonia Forum 2023
		Kenali dan Kritis Daftar Calon Sementara Legislatif Untuk Pemilu Tahun 2024 Sesi 2
		Penguatan Kapasitas Jejaring Pendidikan Tinggi Tematik 1 Pengendalian Konflik Kepentingan pada Penyusunan Karya Ilmiah di PT
		Sinergitas Delapan Gatra Kehidupan Nasional Indonesia bagi Kepentingan Ketahanan Indonesia
		Masa Depan Reformasi Birokrasi dan Pemerintahan
		Urgensi Evaluasi UU Desa di Tengah Hiruk Pikuk Pemilu 2024
		Internet of Things - Pahami Keamanan Sibermu
		Leadership Studies with Dr Dino Patti Djalal
		Sikap dan Kebijakan Indonesia tentang Kecerdasan Buatan
		Cegah Plagiarisme - Lindungi Kekayaan Intelektual di Ruang Digital
		Prospek Normalisasi Hubungan Diplomatik Arab Saudi-Israel
		Prospek Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
		Beyond MOU - Opportunities for National Industry within Defence Cooperation
		Civil and Defence - Reaping Economic Benefits of Dual-Use Technology
		Kemaritiman Dalam Perspektif Sejarah dan Budaya
		Strategi Pembumih Pancasila Dalam Tata Kelola Negara, Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan
		Peluncuran Buku Kehampaan Hak dan Diskusi Publik Kehampaan Hak Rakyat di Hadapan Oligarki Menjelang Pemilu 2024
40	197111121996032001	Indra Sugiyarsih, S.H., M.P.A.
		Membangun Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Laut Indonesia
		Urgensi Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi
		Kerja Sama Penanggulangan Narkotika di Perbatasan
		Pembangunan Ekonomi dengan Karakter Wilayah Kepulauan

NIP	NAMA	SEMINAR/KONFERENSI/SOSIALISASI	
41	'196807011994031001	Edwin Jeffrey Herald Wuisang, S.H., M.M., M.H.	Pemanfaatan MPP Digital untuk Pemutakhiran Data dalam Pemberdayaan Masyarakat
			Analisis Strategi Kebijakan Tentang Pengadilan HAM di Indonesia
			Membangun Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Laut Indonesia
			Pembangunan Ekonomi dengan Karakter Wilayah Kepulauan
			Refleksi 60 Tahun Integrasi Papua - Menemukan Jalan Damai dari Akar Rumput
			Mewaspada Bahaya Politik Identitas Bagi Kalangan Milenial
			Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Narkoba Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
The QUAD and What It Means for ASEAN			
			Dinamika Pilpres 2024 - Peta Saat Ini
42	'199602142019022001	Ajeng Dhana Roswita, S.H.	Knowledge Sharing Tentang Carbon Accounting
43	'199003132018012001	Melysa Retsahana, S.H.	Knowledge Sharing Tentang Carbon Accounting
44	'199210132019022001	Penita Prasasya, S.H.	This Is Our World Too
45	'199308252018012001	Ulivia Tejo Saputri, S.I.P.	Knowledge Sharing Tentang Carbon Accounting
			Kode Desain Sesuai Umur
46	'198511112009022001	Rika Yuristia Mardhiyah, S.H., M.H.	Pembangunan Ekonomi dengan Karakter Wilayah Kepulauan
			Sketsa Masa Depan Pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia Pasca-Pemilu 2024
47	'198607052008011003	Arnando Jujur Pardamean Siregar, S.H., M.H.	Kode Desain Sesuai Umur
			Pembangunan Keamanan Laut untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025-20245
			Sketsa Masa Depan Pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia Pasca-Pemilu 2024
48	'197108031998031002	Agus Widiyanto, S.Sos., M.H.	Menimbang Ulang Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Dalam Perspektif Pancasila
			Bimbingan Teknis Kearsipan untuk Arsiparis Hasil Penyetaraan
49	'198607252014021001	Buheti, S.H.	Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Narkoba Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
			Analisis Strategi Kebijakan Tentang Pengadilan HAM di Indonesia
50	'199409192018012001	Indri Sukmawati Djangko, S.H.	Sketsa Masa Depan Pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia Pasca-Pemilu 2024
			Setahun Perang Rusia-Ukraina Pembelajaran bagi Operasi Udara dan Laut TNI
51	'199408142018012003	Rahma Izza Rabbani, S.E.	Analisis Strategi Kebijakan Tentang Pengadilan HAM di Indonesia
			Sketsa Masa Depan Pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia Pasca-Pemilu 2024
			Setahun Perang Rusia-Ukraina Pembelajaran bagi Strategi Pertahanan Darat Indonesia
			Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Narkoba Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
			Sketsa Masa Depan Pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia Pasca-Pemilu 2024
			An Escape from Poverty (Strategi Pengentasan Kemiskinan)
			Best Practice Program Pengembangan Wirausaha
			Implementasi Undang-Undang Pembangunan Kebudayaan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2022
			Integrasi Perencanaan Pembangunan Perdagangan
			Langkah Persiapan Evaluasi Zona Integritas Instansi Pemerintah Tahun 2023
Optimalisasi Program Bursa Kerja Sebagai Upaya Menurunkan Angka Pengangguran			
52	'199104222015022001	Kartika Puspitasari, S.H.	Pembangunan dan Persiapan Evaluasi Zona Integritas
			Penguatan Akuntabilitas Keuangan Dalam Rangka Implementasi Reformasi Birokrasi
			Peran Perangkat Daerah dalam Mengelola Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Masyarakat Melalui Perlindungan Hukum
			Persiapan Menuju Evaluasi Reformasi Birokrasi
			Refleksi Peran Pemerintah dalam Transformasi Industri 4.0
			Reformasi Birokrasi Area Manajemen Perubahan
			Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten Kota
			Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Strategi Integrasi Kebijakan Investasi Pusat dan Daerah Tahun 2023
			Strategi Penguatan Manajemen Risiko dalam Proses Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Strategi Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah			
Strategi Perencanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
Tips dan Trik Penyusunan KLHS RPJPD			
Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan dalam Perspektif Perencanaan			
Chinese HSK 1 Programme and Simulation			
			IELTS Workshop for Masters and Doctoral Degree
			IELTS Private Lessons for Masters and Doctoral Degree

NIP	NAMA	SEMINAR/KONFERENSI/SOSIALISASI
53	'198308272006041004	Luqman Hakim, S.E., M.P.A.
		Pengembangan Negara Kepulauan Berwawasan Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045
		Menimbang Ulang Tata Kelola Pemerintahan dan Pembangunan Dalam Perspektif Pancasila
		Satu Tanah Air Indonesia - Pembangunan Wilayah Kepulauan Terdepan
		Kebijakan P4GN Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Untuk Menjaga Ketahanan Nasional
		Lanskap Strategis Asia Tenggara di Era Geopolitik 5.0
		Manajemen Talenta ASN (KOICA)
		Peran Lembaga Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Peserta Didik Guna Menghadapi Tantangan Perang Masa Depan - Generasi ke-6
		In Search for a Viable Political Solution - Can the Long Lost Two-State Solution be Revived
		Budaya Malu - Etika Moral Demokrasi
		Politics of Regional Architecture for Peace, Prosperity and Freedom in the Digital Era with Dr. Nobuhiro Aizawa
		Risiko Penyakit Tidak Menular Pada Pekerja
		Pencegahan stunting dengan strategi komunikasi kultural dan pemberian Kudapan Sehat Serta Pentingnya Fenomena Kolesterol LDL bagi kesehatan
		This Is Our World Too
		Protecting Indonesias Underwater Sovereignty and Security
		Pembangunan Ekonomi Inklusif yang Berkelanjutan serta Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur
		Kualitas Diet pada Berbagai Kelompok Populasi di Indonesia
		Kepemimpinan Digital Dalam Konsolidasi Demokrasi
		Pemanfaatan Media untuk Mencegah KEK, Daging sebagai Sumber Zat Gizi, dan Hubungan Makan Malam dengan Obesitas
		Laying the Bricks for Just and Equitable Solutions to Climate Crisis
		Strengthening Defence, Safeguarding Nature - TNIs Energy Transition Plan
		Bimbingan Teknis Kearsipan untuk Arsiparis Hasil Penyetaraan Keluarga Cerdas dan Bahagia Untuk Indonesia Maju
		Sketsa Masa Depan Pembangunan Papua dan Kawasan Timur Indonesia Pasca-Pemilu 2024
		Outward-Looking Strategy Key to Post-MEF Naval Posture
		Indonesia Merdeka Dari Korupsi
		Beyond MOU - Opportunities for National Industry within Defence Cooperation
		Prospek Ekonomi Indonesia di Tengah Ketidakpastian Global
		Ask Me Anything About Trading
		Civil and Defence - Reaping Economic Benefits of Dual-Use Technology
		Sikap dan Kebijakan Indonesia tentang Kecerdasan Buatan
		Cegah Plagiarisme - Lindungi Kekayaan Intelektual di Ruang Digital
		Kemaritiman Dalam Perspektif Sejarah dan Budaya
		International Trade with Prof Fukunari Kimura
		Menuju 20 Tahun MK - Antara Judicialization of Politics dan Politicization of the Judiciary
		Dinamika Pilpres 2024 - Peta Saat Ini
		Intervensi Presiden pada Pilpres 2024 - Perspektif Hukum Tata Negara dan Politik
		Pemanfaatan MPP Digital untuk Pemutakhiran Data dalam Pemberdayaan Masyarakat
		Inovasi dalam Melindungi Pekerja Ekonomi Gig
		Urgensi Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi
		Unlocking the Potential - Penetrating the Global Defence Supply Chain
		Analisis Strategi Kebijakan Tentang Pengadilan HAM di Indonesia
		Gerakan Masyarakat dan Pemuda Anti Narkoba Menuju Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024
		Pembangunan Ekonomi dengan Karakter Wilayah Kepulauan
		AUKUS Nuclear Submarine Pact - A Reminder of Indonesias Vulnerable Underwater Defence
		Menuju Paradigma Baru Pemidanaan Indonesia
		Kerja Sama Penanggulangan Narkotika di Perbatasan
		Transfer of Technology - A Strategic Partnership in Defence Investment
		Prospek dan Tantangan Energy Transition Mechanism (ETM)
		Urgensi Evaluasi UU Desa di Tengah Hiruk Pikuk Pemilu 2024
		Membangun Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Laut Indonesia
Pupuk Indonesia Clean Ammonia Forum 2023		
Sinergitas Delapan Gatra Kehidupan Nasional Indonesia bagi Kepentingan Ketahanan Indonesia		
Setahun Perang Rusia-Ukraina Pembelajaran bagi Operasi Udara dan Laut TNI		
Building Regional Architecture with Dr Tsutomo Kikuchi		
Leadership Studies with Dr Dino Patti Djalal		

## Artikel Kedeputusan Bidang Polhukam pada Website Setkab

NO	JUDUL ARTIKEL
1	MIKTA sebagai Kekuatan Penyeimbang dalam Penyelesaian Isu Global
2	Keketuaan ASEAN dan Visi Politik Luar Negeri Indonesia
3	Penanganan Keberatan atas Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilu
4	Memaksimalkan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak di Luar Negeri
5	Golden Visa: Keuntungan, Kerugian, dan Kemungkinan Penerapannya di Indonesia
6	Perkembangan Perjanjian Perdagangan Bilateral antara Indonesia dengan Negara Mitra
7	Kontribusi Kapasitas Sipil Indonesia pada Misi Pemeliharaan perdamaian PBB
8	Diplomasi ekonomi Indonesia ke Afrika: Tantangan dan Peluang
9	Penerapan Zero Trust sebagai Upaya Pelindungan dari Ancman Serangan Siber
10	Perkembangan Konsep Pembinaan dan Pengawasan dalam Peraturan Perundang-Undangan Dari Tahun 1999 Sampai Sekarang
11	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
12	Pemanfaatan Hasil Evaluasi Peraturan Perundang-undangan
13	Penanggulangan Bahaya Narkoba melalui Rehabilitasi
14	Pembentukan dan Ratifikasi Perjanjian Internasional di Prancis
15	Perkembangan Perjanjian Perdagangan Bilateral antara Indonesia dengan Negara Mitra
16	Keberadaan Peraturan Pemerintah Mandiri dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
17	Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah
18	Perkembangan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024
19	Implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific Melalui ASEAN Indo-Pacific Forum 2023: Kemanfaatan dan Tantangan
20	Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di ASEAN
21	ASEAN Concord IV: Legacy Indonesia Pada Keketuaan ASEAN 2023
22	Bagaimana Membuat Perencanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
23	Kelembagaan Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rpermen/Kepala Lembaga
24	Peningkatan Hubungan Indonesia dengan Negara-Negara Afrika Pasca Kunjungan Kenegaraan Presiden RI

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA  
DEPUTI BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TAHUN 2023**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja</li> <li>LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj</li> <li>LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai</li> <li>Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah menyajikan profil (hal 1-4)</li> <li>✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018)</li> <li>✓ Capaian kinerja (hal 21-59)</li> <li>✓ Lampiran telah mendukung</li> <li>✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 70)</li> <li>✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 65-67)</li> </ul>
II	Mekanisme penyusunan	<ol style="list-style-type: none"> <li>LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing</li> <li>Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li> <li>Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah dikerjakan PIC masing-masing asdep</li> <li>✓ Data LKj telah memadai</li> <li>✓ Melalui disposisi</li> <li>✓ Data yang disajikan valid</li> </ul>
	Substansi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja</li> <li>Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis</li> <li>Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja</li> <li>Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU</li> <li>Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai</li> <li>Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Telah sesuai dengan PK (hal 15-16)</li> <li>✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 10-15)</li> <li>✓ Telah selaras</li> <li>✓ Telah sesuai</li> <li>✓ Telah sesuai sasaran &amp; indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran &amp; indikator kinerja pada IKU</li> <li>✓ Telah memadai</li> <li>✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 23, 41-42, 56, 57, 59)</li> </ul>